



**PEMERINTAH KOTA BIMA**

**RENCANA KERJA TAHUN  
2020**

**DINAS KOPERASI,  
PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KOTA  
BIMA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT., karena berkat karunia-Nya, tim penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dapat menyelesaikan *“Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2020”*.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang tujuan, sasaran, program & kegiatan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada tahun 2020.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Renja ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Kota Bima maupun masyarakat, serta DPRD dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Kota Bima, Februari 2019

Kepala Dinas Koperindag Kota Bima,

ttd

Nurjanah, S.Sos

Nip. 19631016 198703 2 009

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Dokumen RKPD.....	7
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .....	9
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	9
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	31
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .....	49
2.4 Isu Strategis Daerah.....	54
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	58
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	58
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	59
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	61
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	61
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020	62
4.3 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	65
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....	67
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	76
4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	76
4.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	77
BAB VII. PENUTUP .....	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) OPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja OPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
6. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk

RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.

7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima Tahun 2019 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RKPD Kota Bima Tahun 2019. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima tahun 2019 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Benang merah Rencana Kerja OPD sebagai penguatan Rencana Strategis OPD adalah bagaimana mendorong pembangunan Kota Bima dalam rangka mencapai Visi dan Misinya. Adapun Visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima adalah: *"Berkembangnya Perekonomian Daerah Kota Bima Yang Berorientasi Pada Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Kelembagaan Usaha "*

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima menetapkan 3 (tiga) Misi yang akan menjadi pegangan dalam mengembangkan atau merumuskan langkah - langkah selanjutnya sebagai berikut :

1. Mewujudkan arus perdagangan barang dan jasa yang tertib, wajar dan transparan;
2. Meningkatkan pengendalian serta kelancaran distribusi barang dan jasa, perlindungan konsumen dan kemetrollogian;
3. Pemberdayaan kelembagaan system ekonomi kerakyatan melalui deversifikasi usaha Perkoperasian, UMKM dan IKM ;
4. Mewujudkan Industri yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang koperasi, perindustrian dan, perdagangan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

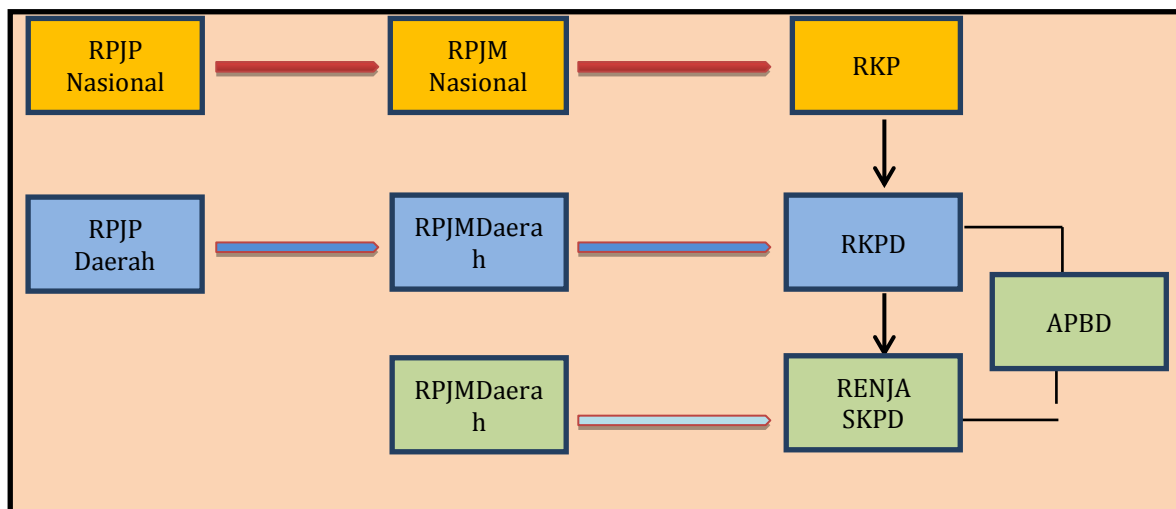
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 23) Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178));
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 30) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);



- 31) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor );
- 32) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88).

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2020 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun 2018. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.1



Gambar 1.1. Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan OPD

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. RKPD juga diserasikan dengan

RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan Renja OPD dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima.

Sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kota Bima, maka RKPD Kota Bima 2020 harus menjabarkan lebih lanjut isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, Arah kebijakan dan Program Prioritas serta Program Perangkat Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Bima 2018-2023 untuk selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan beserta pagu indikatif tahun 2020 yang relevan dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan mempertimbangkan tema, dan prioritas pembangunan tahunan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propvinsi NTB.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Rencana kerja merupakan penjabaran dari sasaran & program yang telah ditetapkan rencana strategi, penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan & kebijakan anggaran. Tujuan utama dari rencana kerja adalah untuk :

- a. Menghubungkan rencana strategis, action plan & perencanaan operasional terperinci;
- b. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program / kegiatan;
- c. Memudahkan proses pengukuran kinerja;
- d. Membantu monitoring & evaluasi kinerja;
- e. Membantu menetapkan tujuan kinerja pada periode yang akan datang.

#### **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2018 dan realisasi capaian RPJMD 2018- 2023; serta permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2017 dan perkiraan tahun 2018, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**BAB VII PENUTUP**

**BAB II****EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN  
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN****2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah****2.1.1. Aspek geografi dan demografi****2.1.1.1. Kondisi Geografis Dan Batas Wilayah Administrasi**

Kota Bima merupakan salah satu wilayah Nusa Tenggara Barat yang berada pada bagian timur Pulau Sumbawa dengan koordinat Lintang Selatan antara 8<sup>o</sup>20'-8<sup>o</sup>30' dan antara 118<sup>o</sup>41' - 118<sup>o</sup>48' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Bima adalah sebesar 222,25 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur, Asakota, Mpunda dan Raba dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Kota Bima**

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
I.	Kecamatan Rasanae Barat	1. Kel. Tanjung	0,79
		2. Kel. Paruga	0,91
		3. Kel. SaraE	0,48
		4. Kel. NaE	0,31
		5. Kel. Pane	0,31
		6. Kel. Dara	7,34
<b>Jumlah I</b>			<b>10.14</b>
II.	Kecamatan Mpunda	1. Kel. Sambinae	5,43
		2. Kel. Panggi	3,51
		3. Kel. Monggonao	0,63
		4. Kel. Manggemaci	0,52
		5. Kel. Penatoi	0,74
		6. Kel. Lewirato	0,49
		7. Kel. Sadia	0,68
		8. Kel. Mande	0,69
		9. Kel. Santi	0,72
		10. Kel. Matakando	1,87
<b>Jumlah II</b>			<b>15.28</b>
III.	Kecamatan Raba	1. Kel. Penaraga	0,74
		2. Kel. Penanae	5,34
		3. Kel. Rite	1,84
		4. Kel. Rabangodu Utara	0,98
		5. Kel. Rabangodu Selatan	1,43
		6. Kel. Rabadompu Timur	0,54
		7. Kel. Rabadompu	1,66
		4,74	31,19
			9,08

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah
		Barat 8. Kel. Rontu 9. Kel. Ntobo 10. Kel. Kendo 11. Kel. Nitu	6,19
Jumlah III			63,73
IV.	Kecamatan Asakota	1. Kel. Melayu 2. Kel. Jatiwangi 3. Kel. Jatibaru 4. Kel. Kolo 5. Kel. Ule 6. Kel. Jatibaru Timur	0,76 18,91 17,18 26,49 3,27 2,42
Jumlah IV			69,03
V.	Kecamatan Rasanae Timur	1. Kel. Kumbe 2. Kel. Lampe 3. Kel. Oi Fo'o 4. Kel. Kodo 5. Kel. Dodu 6. Kel. Lelamase 7. Kel. Nungga 8. Kel. Oimbo	7,23 9,20 5,55 7,93 21,05 11,59 2,74
Jumlah V			64,07
Jumlah I + II + III + IV + V			222,25

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2018

### 2.1.1.2. Topografi

#### a. Ketinggian

Wilayah Kota Bima umumnya didominasi oleh dataran rendah dimana daerah yang berada pada ketinggian antara 0-25 m dpl seluas 14.236 ha atau mencapai 65,52 persen dari luas Kota Bima. Sementara itu luas tanah dengan ketinggian 25-50 m seluas 4.534 ha (20,87%) dan di atas 50 m seluas 2.957 ha (13,63%).

**Tabel 2.2.**  
**Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut**

Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut	Luas Tanah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kota Bima (%)
0 – 25	14.236	65,52
25 – 50	4.534	20,87
> 50	2.957	13,63
Jumlah	21.727	100,00

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2018

#### b. Kelerengan

Untuk tahun 2017, Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan datar dengan kelerengan 0-2°, yaitu seluas 9.242 ha, kemudian lahan bergelombang seluas 4.994 ha. Hal ini menjadi potensi dalam melaksanakan pembangunan fisik dan kawasan budidaya karena didukung oleh kondisi topografi yang memadai.

Adapun lahan dengan kondisi sangat curam dengan luas 2.957 ha dapat difungsikan sebagai kawasan lindung.

**Tabel 2.3.**  
**Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima**

No	Kecamatan	Datar ( 0 - 2 <sup>0</sup> )	Bergelombang ( 2 - 15 <sup>0</sup> )	Curam ( 15 - 40 <sup>0</sup> )	Sangat Curam ( > 40 <sup>0</sup> )
1	Rasanae Barat	854	35	75	50
2	Mpunda	658	132	563	175
3	Rasanae Timur	2.555	1.793	935	1.024
4	Raba	2.950	1.850	848	627
5	Asakota	2.225	1.184	2.113	1.081
<b>J u m l a h</b>		<b>9.242</b>	<b>4.994</b>	<b>4.534</b>	<b>2.957</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

Wilayah Kecamatan Rasanae Timur memiliki keterengn > 40<sup>0</sup> mencapai 39,07%. Luas Kecamatan Raba dengan kemiringan diatas 40<sup>0</sup> mencapai 44,36%. Sebaliknya, Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda didominasi wilayah yang relatif datar dan bergelombang. Sementara itu, 29,91% dari wilayah KecamatanAsakota memiliki karakteristik keterengn bergelombang.

### 2.1.1.3.Klimatologi

Wilayah Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2017 sebesar 147,92 mm<sup>3</sup>/th, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan September yaitu 263,0 mm<sup>3</sup> dan terendah pada bulan Agustus, yaitu 39,0 mm<sup>3</sup>. Rata-rata hari hujan selama tahun 2017 tercatat 14 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada Bulan Februari yaitu 24 hari dan terendah pada bulan Juli dan September sebanyak 6 hari hujan.

Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2017 sebesar 85,08%, tertinggi 90% pada Bulan Desember dan terendah 79% pada Bulan November. Temperatur berkisar pada interval antara suhu minimal 22,40<sup>0</sup>C pada Bulan Agustus dan suhu maksimum 34,90<sup>0</sup>C pada Bulan Oktober, dengan rata-rata suhu 27,47<sup>0</sup>C. Kondisi iklim menunjukkan gejala suhu yang semakin panas dibanding dengan tahun sebelumnya yang rata-rata suhu hanya mencapai 27,13<sup>0</sup>C. Dengan demikian terjadi isu perubahan iklim yang lebih cepat dan perlu disikapi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 2.4**  
**Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2017**

Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan (hh)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	160,0	20	69
Pebruari	156,0	24	55
Maret	148,0	19	67
April	119,0	16	78
Mei	51,0	11	81
Juni	114,0	14	72
Juli	142,0	6	75
Agustus	39,0	7	88
September	263,0	6	85
Oktober	143,0	11	75
Nopember	240,0	11	72
Desember	200,0	20	37
<b>Rata-Rata</b>	<b>147,92</b>	<b>14</b>	<b>71,17</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

**Tabel 2.5**  
**Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan Tekanan Udara Dirinci per bulan di Kota Bima Tahun 2017**

Bulan	Suhu Udara (°C)			Lembab Nisbi (%)	Tekanan Udara(mb)
	Rata-rata	Max	Min		
1. Januari	28,30	34,10	24,90	85,00	1012,00
2. Pebruari	27,70	33,00	25,20	88,00	1011,40
3. Maret	28,00	33,10	25,30	88,00	1011,80
4. April	27,90	33,70	24,70	88,00	1011,60
5. Mei	27,20	33,70	24,80	86,00	1011,30
6. Juni	27,30	33,00	23,70	85,00	1012,30
7. Juli	26,30	31,70	23,00	87,00	1012,20
8. Agustus	26,40	32,40	22,40	83,00	1014,70
9.	27,60	34,20	23,60	82,00	1014,70
10. Oktober	28,40	34,90	24,30	80,00	1011,50
11.	26,40	34,70	24,70	79,00	1010,60
12.	28,10	33,20	25,60	90,00	1008,90
<b>Rata-Rata</b>	<b>27,47</b>	<b>33,48</b>	<b>24,35</b>	<b>85,08</b>	<b>1011,92</b>

Sumber : BPS Kota Bima 2018

#### 2.1.1.4. Geologi

Wilayah Kota Bima dan sekitarnya secara geomorfologi dan berdasarkan morfometri dan morfogenesis dapat dikelompokkan ke dalam 4 satuan geomorfologi, yaitu:

1. Satuan geomorfologi dataran fluvial.

Di daerah Kota Bima ini terhampar diantara perbukitan disekitarnya dan Teluk Bima yang terletak di tengah-tengah daerah Kota Bima memanjang dari Barat ke Timur melalui celah antara Dora Pokah dengan Doro Kolo. Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm 20\%$  dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian utara dan bagian selatan lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran fluvial, meliputi daerah Jatibaru, Sadia, Sambinae, Monggonao, Paruga, Nae, Santi, Penatoi, Penaraga, Raba Ngodu, Raba Dompou, Kumbe, Sadia, Kendo, Tato, Lampe, dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran fluvial ini memiliki nilai beda tinggi rata – rata 3 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir dan lempung.

2. Satuan Geomorfologi Dataran Endapan Pantai

Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm 10\%$  dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian barat Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai, meliputi: daerah Tanjung, Melayudan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai ini memiliki nilai beda tinggi rata – rata 2 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir.

3. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional.

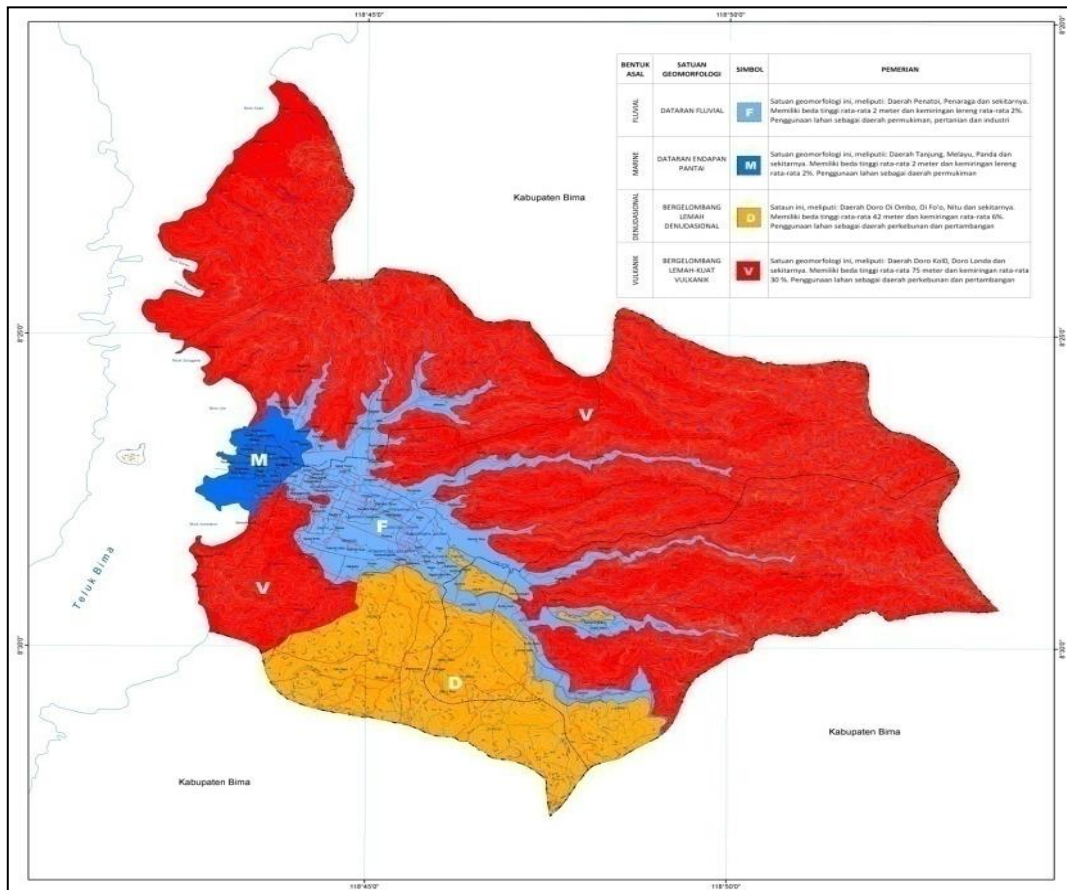
Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua, batuan sedimen dan setempat-setempat oleh batugamping koral. Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm 30\%$  dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional, meliputi: daerah Doro Oi'ombo, Doro Oi'si,i, Doro Jati Oi'ifoo, Nitu dan sekitarnya. memiliki nilai beda tinggi rata – rata 42 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 6 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah batugamping dan batupasir.

4. Satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik.

Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua berupa breksi, lava, tuf dan batuan beku terobosan. Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm 40\%$  dari daerah Kota Bima,



yang terhampar luas pada bagian tengah dan bagian selatan lokasi Kota Bima satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik, meliputi: daerah Doro Kolo, Doro Lewamori, Doro Lalepa, Doro Londa dan sekitarnya. Memiliki nilai beda tinggi rata – rata 75 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 13 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah andesit dan tuf.



**Gambar 2.1. Geomorfologi Kota Bima**

**2.1.1.5. Hidrologi**

Wilayah Kota Bima dilewati oleh 7 (tujuh) sungai. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu di sebelah utara dan timur Kota Bima, dan bermuara menuju Teluk Bima. Sungai terpanjang adalah Sungai Lampe yang memiliki panjang 25 km. Air sungai dimanfaatkan antara lain sebagai sumber air minum dan pengairan/irigasi.

**Tabel 2.6. Sungai di Kota Bima**

Nama Sungai	Panjang Sungai	Lebar Sungai	Kecamatan	
			Hulu	Hilir
1   Sungai Lampe	25	30	Rasanae Timur	Rasanae Barat

Nama Sungai		Panjang Sungai	Lebar Sungai	Kecamatan	
				Hulu	Hilir
2	Sungai Dodu	12	20	Rasanae Timur	Rasanae Timur
3	Sungai Mungga	22	20	Rasanae Timur	Mpunda
4	Sungai Kanda	15	15	Raba	Rasanae Barat
5	Sungai Ntobo	12	15	Raba	Rasanae Barat
6	Sungai Letiraga	16	12	Asakota	Asakota
7	Sungai Romo	2	2,5	Asakota	Asakota

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2018

Mata air yang ada di Kota Bima teridentifikasi berada di beberapa lokasi, terutama di Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Asakota. Mata air ini sebagian sudah dimanfaatkan oleh warga sebagai air baku air minum dan untuk mata air dengan debit yang besar telah dimanfaatkan oleh PDAM sebagai sumber air baku.

#### 2.1.1.6. Kondisi Demografis

##### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2017 mencapai 166.407 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 81.725 jiwa dan perempuan sebanyak 84.682 jiwa.

**Tabel 2.7.**  
**Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2017**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Rasanae Barat	18.602	19.418	38.020
2.	Mpunda	19.208	19.869	39.077
3.	Raba	20.167	20.932	41.099
4.	Rasanae Timur	8.627	8.739	17.366
5.	Asakota	15.121	15.724	30.845
Jumlah Total		81.725	84.682	166.407

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

## b. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, kelompok usia muda (0-14 tahun) berjumlah 46.772 jiwa atau 28,11%. Sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 111.459 jiwa atau 66,98% dan kelompok usia non produktif (65 tahun keatas) berjumlah 8.176 jiwa (4,91%).

**Tabel 2.8.**  
**Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Tahun 2017**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	8.148	7.755	15.903
5-9	8.015	7.793	15.808
10-14	7.640	7.421	15.061
15-19	8.425	8.550	16.975
20-24	9.225	9.096	18.321
25-29	6.936	6.783	13.719
30-34	6.158	6.775	12.933
35-39	5.460	5.922	11.382
40-44	5.174	5.968	11.142
45-49	4.462	4.840	9.302
50-54	3.594	3.862	7.456
55-59	2.874	3.269	6.143
60-64	1.884	2.202	4.086
65-69	1.494	1.621	3.115
70-74	982	1.160	2.142
75+	1.254	1.665	2.919
<b>Jumlah</b>	<b>81.725</b>	<b>84.682</b>	<b>166.407</b>

*Sumber : BPS Kota Bima, 2018*

Dari data komposisi penduduk menurut kelompok umur ini diketahui rasio ketergantungan total adalah sebesar 33,02 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 33 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 33,02 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 - 64 tahun) sebesar 28,11 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua (perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun) sebesar 4,91 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2017, penduduk

usia kerja di Kota Bima masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

c. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Kota Bima tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA/ sederajat yang mencapai 42.078 jiwa atau sebesar 25,29 persen dari total penduduk. Angka penduduk berpendidikan rendah yang merupakan tamatan SD sampai SLTP sederajat mencapai 33.391 jiwa atau 20,07 persen. Jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi diploma sebesar 3.518 atau 2,11 persen dan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi sarjana dan pasca sarjana sebesar 12.075 atau 7,26 persen, dimana 14 diantaranya adalah berpendidikan S3 (doctor) dan sebanyak 518 berpendidikan S2 (Master). Sedangkan jumlah penduduk yang tidak menamatkan SD masih sangat tinggi yaitu sejumlah 20.646 jiwa atau 12,41 persen dari jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk yang belum/tidak bersekolah sebanyak 32.096 jiwa atau 19,29 persen.

d. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk

Indikator penting untuk melihat persebaran penduduk adalah rasio kepadatan penduduk (*density ratio*), yang sangat berkaitan erat dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah.

Berdasarkan persebaran penduduk, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat dengan jumlah kepadatan 3.750 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah dengan jumlah kepadatan 271 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.9.**  
**Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima**  
**Tahun 2013 – 2017 (Jiwa/km<sup>2</sup>)**

No.	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasanae Barat	3.200	3.367	3.599	3.675	3.750
2	Mpunda	2.218	2.333	2.459	2.511	2.557
3	Raba	571	600	619	632	645
4	Rasanae Timur	264	277	261	266	271
5	Asakota	421	443	427	437	447
Jumlah		669	704	718	734	749

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat persebaran penduduk yang tidak merata diantara wilayah khususnya antara wilayah bagian barat dan bagian timur wilayah Kota Bima. Hal ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi kawasan tersebut, dimana pada bagian barat merupakan kawasan sub pusat perdagangan dan jasa sedangkan dibagian timur merupakan kawasan pertanian dan kawasan konservasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kota Bima sehingga persebaran penduduk akan terdistribusi secara merata.

#### **e. Pencatatan Sipil**

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran. Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah penduduk Kota Bima yang memiliki KTP-Elektronik dan telah melakukan penyerapan/perekaman KTP-Elektronik adalah 92.852 jiwa atau 95.62%. Kepala keluarga di Kota Bima, yang sudah memiliki Kartu Keluarga Nasional sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 38.237 atau 97.38 %. Jumlah pencatatan kelahiran tahun 2017 yaitu sebanyak 52.359 jiwa.

**Tabel 2.10.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir**  
**Tahun 2013 -2017**

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jumlah Penduduk Wajib KTP					97.107
Jumlah Penduduk sudah cetak KTP					92.852
Rasio Penduduk ber-KTP					95,62 %
Jumlah Penduduk ber-akte lahir					52.359
Jumlah KK	37.187	39.020	39.242	39.290	39.304
Sudah Cetak KK					38.273
Rasio Kepemilikan KK					97,38 %

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018*

#### **f. Ketenagakerjaan**

Berdasarkan undang - undang ketenagakerjaan, yang termasuk dalam kategori tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia diatas 15 tahun ke atas. Sedangkan menurut ILO yang termasuk dalam katagori tenaga kerja adalah penduduk yang berusia mulai dari umur diatas 10 tahun. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan pada komponen Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah Penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sifatnya sementara, tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lansia (penerima pensiun).

Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kota Bima mencapai 86.954 Jiwa. Angkatan kerja laki-laki sebanyak 48.379 jiwa atau lebih besar dibandingkan jumlah angkatan kerja perempuan yang hanya sejumlah 38.575 jiwa. Dari jumlah tersebut, 96,49 persen angkatan kerja sudah bekerja sedangkan 3,51 persen menganggur. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja adalah sebesar 33.224 Jiwa yang terdiri dari penduduk yang masih sekolah sebanyak 10.357 jiwa

dan penduduk yang mengurus rumah tangga sebanyak 20.253 jiwa dan penduduk dengan kegiatan lainnya 2.614 jiwa.

**Tabel 2.11.**  
**Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2013-2017**

<b>N</b> <b>o</b>	<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	JUMLAH PENDUDUK ≥ 15 THN (JIWA)	90.83	101.98	114.68	117.00	120.17
		2	0	8	3	8
2	ANGKATAN KERJA (JIWA)	60.70	68.947	76.867	80.768	86.954
		6				
	Bekerja	51.08	60.133	69.063	76.164	83.905
		4				
	Pengangguran/TPT	9.622	8.814	7.804	4.604	3.049
3	BUKAN ANGKATAN KERJA (JIWA)	30.12	33.033	37.821	36.235	33.224
		6				
	Sekolah	9.706	10.510	11.609	11.215	10.357
	Mengurus RT (%)	18.37	20.367	22.566	21.876	20.253
		6				
	Lainnya (%)	2.044	2.156	3.646	3.144	2.614

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Bima pada tahun 2017 didominasi oleh 4 (empat) sektor lapangan pekerjaan. Penduduk yang bekerja di sektor jasa adalah yang paling dominan yaitu mencapai 31,65 persen. Lapangan pekerjaan selanjutnya pada sektor perdagangan yaitu sebesar 27,41 persen, sektor lain sebesar 16,26 persen, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 13,37 persen. Sementara penduduk yang bekerja di sektor Perindustrian tercatat dengan persentasenya hanya 11,32 persen.

**Tabel 2.12.**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2013 - 2017**

<b>Lapangan Pekerjaan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan			9.232		11.303
2. Pertambangan dan Penggalan			768		5.145
3. Industri Pengolahan			7.818		8.015
4. Listrik, Gas dan Air			161		703
5. Bangunan			4.310		6.750
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel			18.929		18.314
7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi			3.943		4.835
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan			2.045		3.186
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan			21.857		25.654
<b>J u m l a h</b>			<b>69.063</b>		<b>83.905</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan memang merupakan lapangan pekerjaan dominan bagi penduduk Kota Bima. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah sebagai sebuah kota meskipun sektor pertanian dalam arti luas juga masih memberikan kontribusi yang cukup besar.

Pertumbuhan sektor Perdagangan dan Jasa ini pada dasarnya didukung oleh keberadaan pelabuhan laut Bima serta fungsi wilayah kota Bima dalam struktur ruang regional sebagai sub pusat pertumbuhan di bagian timur Propinsi NTB. Oleh



karena itu, pengembangan kota diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Adapun sebagai Kota Jasa, Kota Bima akan lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat koleksi dan distribusi.

## **B. Kawasan Budidaya**

### **1. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa**

Perkembangan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Bima keberadaannya memusat di pusat kota, tetapi ada indikasi berkembang secara linier pada jalan-jalan utama kota. Kegiatan perdagangan di wilayah Kota Bima semakin berkembang dan meningkat. Dalam skala regional keberadaan Kota Bima adalah sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi barang dan jasa untuk wilayah sekitarnya, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan skala regional. Sehingga keberadaan Kota Bima mempunyai arti yang sangat penting dan perlu diarahkan secara tetap dan memenuhi sasaran. Sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan Kota Bima maka rencana pengembangan kawasan komersial yang ada di KotaBima adalah sebagai berikut :

- Untuk pusat perbelanjaan berupa pasar raya Bima sebagai pasar grosir. Kegiatan perdagangan ini perlu dilengkapi dengan tempat bongkar muat barang, tempat parkir kendaraan, tempat sampah dan perlengkapan kebersihan lainnya. Pusat perbelanjaan berupa plasa dan pasar swalayan di Kota Bima perlu dikembangkan mengingat kecenderungan perkembangan kota Bima yang semakin pesat. Mengingat keberadaan pasar swalayan ini mempunyai daya tarik yang besar, maka untuk pengembangan yang akan datang diusahakan berada pada kawasan yang baru, seperti di sekitar pusat perkantoran. Dengan demikian diharapkan kegiatan aktivitas kota tidak hanya memusat dipusat kota saja, tetapi mampu berkembang secara merata di seluruh wilayah Kota Bima. Salah satu upaya lain yang perlu diperhatikan adalah mengusahakan keberadaan pasar swalayan dan Plasa ini tidak mengganggu keberadaan pasar tradisional yang ada. Untuk kegiatan perdagangan campuran, seperti garment/konveksi, elektronik, dealer motor, biro perjalanan, jasa seperti bank berkembang secara linier yaitu mulai dari Sultan Hasanuddin, Jalan Sultan Kaharuddin, dan Jalan Gajah Mada serta Jalan Jenderal Soedirman, Pengembangan perdagangan dan jasa ini perlu

dibatasi, mengingat keberadaan kawasan perdagangan ini sudah padat dan tidak adanya tempat parkir yang memadai. Sehingga yang perlu dilakukan pada kawasan perdagangan dan jasa ini adalah pengaturan parkir dengan sistem parkir paralel dan parkir menyudut untuk memenuhi kebutuhan parkir pengunjung dikawasan tersebut.

## **2. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan**

Lokasi Pengembangan Kawasan industri dan pergudangan diKotaBima direncanakan:

- Pengembangan Kawasan industri marmer dengan skala nasional dan internasional berlokasi di Kelurahan OiFo'o dan sekitarnya dengan luasan 46,94 Ha.
- Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Kelurahan Tanjung, industri garam rakyat di Kelurahan Dara dan Kelurahan Paruga, dan industri pengolahan hasil pertanian di KelurahanJatiwangi dengan luas sebesar 14Ha.
- Pengembangan Kawasan industri kecil atau industri tenunan tradisional dengan skala regional dan lokal berlokasi di Kelurahan Ntobo, Kelurahan Nitu, Rabadompu Barat, Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Kumbe dan didukung oleh kegiatan industri tenun diseluruh kelurahan dikota.
- Adapun untuk pengembangan kawasan pergudangan dipusatkan di Lingkungan Kampung Sumbawa Kelurahan Tanjung, sampai Lingkungan Bina Baru Kelurahan Dara.

## **3. Kawasan Peruntukan Sektor Informal**

Peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal direncanakan dilakukan diareal kawasan perdagangan dan jasa, areal rekreasi sepanjang pantai Niu-Lawata-Amahami Kelurahan Dara, taman lapangan Pahlawan Raba, Kompleks Paruga Nae, Jalan Sulawesi, Jalan Flores, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Salahuddin, Jalan Mujair, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Martadinata, Jalan Gajah Mada.

## **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **1.1.2 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **1.1.3 a. Pertumbuhan PDRB**

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai 3,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 3,30 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 2,60 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 2,75 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan selama tahun 2017 Kota Bima mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,76 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai 3,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 3,30 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Kota Bima didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bima.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bima pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan. Peranan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yaitu mencapai 24,14 persen (angka ini meningkat dari 22,57 persen di tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,54 persen (turun dari 14,63 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,19 persen (turun dari 12,23 persen di tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,18 persen (turun dari 10,29 persen di tahun 2013) dan Konstruksi sebesar 9,07 persen.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, hanya kategori Perdagangan Besar dan Eceran yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 9 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

**Tabel 2.13.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan**  
**Usaha di Kota Bima (juta rupiah),2013-2017**

Kategori	2013		2014		2015		2016		2017	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	336.300,89	15,44	375.446,07	14,06	419103,64	14,00	456132,74	13,82	493346,96	13,54
B Pertambangan dan Penggalian	8.954,16	0,41	10339,67	0,39	11602,50	0,39	12360,28	0,37	14097,66	0,39
C Industri Pengolahan	80.022,40	3,67	84973,46	3,18	92352,46	3,08	102837,40	3,12	110814,31	3,04
D Pengadaan Listrik dan Gas	4.023,22	0,18	4453,68	0,17	4806,06	0,16	6189,54	0,19	6715,10	0,18
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	812,44	0,04	1.062,74	0,04	1133,97	0,04	1238,97	0,04	1348,72	0,04
F Konstruksi	206.177,73	9,47	232528,23	8,71	262620,58	8,77	292775,06	8,87	330481,46	9,07
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	483.862,68	22,22	611022,81	22,88	690154,42	23,05	776810,06	23,53	879770,47	24,14
H Transportasi dan	233.209,92	10,71	271700,05	10,17	304326,98	10,16	334801,01	10,14	371197,84	10,18
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuman	53.703,74	2,47	79856,60	2,99	91206,42	3,05	102539,52	3,11	113992,69	3,13
J Informasi dan Komunikasi	38.284,13	1,76	44737,74	1,57	44737,74	1,49	49111,33	1,49	55619,45	1,53
K Jasa Keuangan	50.203,07	2,31	62.667,71	2,35	68924,34	2,30	76959,25	2,33	88.943,55	2,44
L RealEstate	109.062,67	5,01	146189,59	5,47	163474,41	5,46	179414,50	5,44	195907,11	5,38
M,N Jasa Perusahaan	7.585,39	0,35	9669,24	0,36	10675,67	0,36	11676,75	0,35	12829,34	0,35
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	241.203,93	11,08	348307,37	13,04	395400,82	13,21	419257,39	12,70	444130,76	12,19
P Jasa Pendidikan	167.086,93	7,67	210690,68	7,89	233738,97	7,81	260148,87	7,88	284562,99	7,81
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75.729,13	3,48	86765,99	3,25	94918,44	3,17	103274,42	3,13	111597,54	3,06
R,S,T,U Jasa lainnya	81.321,41	3,73	93521,26	3,50	104950,21	3,51	115182,20	3,49	129372,78	3,55
<b>PDRB</b>	<b>2.177.543,21</b>	<b>100</b>	<b>2.671.111,92</b>	<b>100</b>	<b>2.994.127,63</b>	<b>100</b>	<b>3.300.709,27</b>	<b>100</b>	<b>3.644.728,72</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

**Tabel 2.14.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah),2013–2017**

Kategori	2014		2015		2016		2017	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	348728,89	3,70	362720,26	4,01	369630,11	1,91	386436,04	4,55
B Pertambangan	9541,55	6,36	10247,07	7,39	10883,88	6,21	11738,27	7,85
C Industri Pengolahan	83091,96	3,84	86266,01	3,82	91305,57	5,84	96369,39	5,55
D Pengadaan Listrik dan Gas	5624,75	39,81	5329,26	-5,25	6253,89	17,35	6472,08	3,4
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	839,68	3,35	860,19	2,44	899,57	4,58	949,13	5,51
F Konstruksi	219580,18	6,50	234125,70	6,62	253666,65	8,35	278069,38	9,62
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	519259,27	7,32	556890,99	7,25	601525,03	8,01	652960,52	8,55
H Transportasi dan Perhubungan	246169,98	5,56	260644,79	5,88	274880,23	5,46	295740,54	7,59
I Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	57118,64	6,36	60993,37	6,78	65947,50	8,12	70367,02	6,70
J Informasi dan Komunikasi	40903,95	6,84	43826,09	7,14	47570,24	8,54	51356,84	7,96
K Jasa Keuangan	53276,78	6,12	56675,02	6,38	60744,1	7,18	66562,90	9,58
L Real Estate	115390,71	5,80	122808,55	6,43	129988,46	5,85	137575,22	5,84
M,N Jasa Administratif dan Manajemen Lainnya	8106,89	6,87	8524,27	5,15	8979,99	5,35	9489,15	5,67
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	253082,08	4,92	262778,38	3,83	269722,21	2,64	277004,71	2,70
P Jasa Pendidikan	177858,43	4,55	189031,70	6,45	200136,14	6,28	212677,87	5,87
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79558,07	5,06	83773,40	5,30	88707,45	5,89	93622,10	5,54
R,S,T,U Jasa lainnya	87701,70	7,85	92992,43	6,03	99127,45	6,60	107008,09	7,95
<b>PDR B</b>	<b>2305833,52</b>	<b>5,89</b>	<b>2438487,46</b>	<b>5,75</b>	<b>2579968,51</b>	<b>5,80</b>	<b>2754399,26</b>	<b>6,76</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan 2010, mencapai 2,75 trilyun rupiah. Angka tersebut naik dari 2,58

trilyun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,80 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan infrastruktur. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama di sepanjang Jalan Sukarno Hatta dan perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi yaitu sebesar 9,62 persen. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbaikan infrastruktur akibat banjir bandang yang melanda Kota Bima pada akhir bulan Desember 2016. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sembilan persen. Sedangkan delapan lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari enam persen.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sembilan persen tersebut antara lain: lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,62persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,58persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,55 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,96 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,95 persen, lapangan usaha Jasa Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,85 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan 7,59persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,70persen,

Sedangkan delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 6 (enam) persen adalah Lapangan usaha Real Estat sebesar 5,84 persen, Jasa Perusahaan tercatat sebesar 5,67 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,55 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,54 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,51 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,55 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas 3,49 persen, dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,70 persen.

**Tabel 1.15.**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut**  
**Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017**

Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
A Pertanian, Kehutanan,dan	1,94	3,70	4,01	1,91	4,55
B Pertambangan danPenggalian	(5,10)	6,36	7,39	6,21	7,85
C Industri Pengolahan	5,18	3,84	3,82	5,84	5,55
D Pengadaan Listrik dan Gas	24,96	39,81	-5,25	17,35	3,49
E PengadaanAir, Pengelolaan Sampah,Limbah danDaurUlang	1,84	3,35	2,44	4,58	5,51
F Konstruksi	6,76	6,50	6,62	8,35	9,62
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,28	7,32	7,25	8,01	8,55
H Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,56	5,88	5,46	7,59
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	6,36	6,78	8,12	6,70
J Informasi dan Komunikasi	4,06	6,84	7,14	8,54	7,96
K Jasa Keuangan danAsuransi	7,71	6,12	6,38	7,18	9,58
L RealEstate	6,00	5,80	6,43	5,85	5,84
M,N Jasa Perusahaan	4,89	6,87	5,15	5,35	5,67
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan JaminanSosial	3,36	4,92	3,83	2,64	2,70
P Jasa Pendidikan	4,55	4,55	6,45	6,28	5,87
Q Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial	4,38	5,06	5,30	5,89	5,54
R,S, Jasa lainnya	7,54	7,85	6,03	6,60	7,95
<b>PDRB</b>	<b>5,58</b>	<b>5,89</b>	<b>5,75</b>	<b>5,80</b>	<b>6,76</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

\*) Angka Semembara ; \*\*) Angka Sangat Sementara

#### 1.1.4 b. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau persatu orang penduduk.

Nilai PDRB perkapita Kota Bima atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB perkapita



tercatat sebesar 15,5 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 21,90 juta rupiah (lihat tabel11). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**Tabel 2.16.**  
**PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2013-2017**

<b>Nilai PDRB (Milliar Rupiah)</b>					
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
- ADHB	2.37	2.67	2.99	3.30	3.64
- ADHK					
<b>PDRB perKapita(RibuRupiah)</b>					
- ADHB	15.50	17.07	18.74	20.23	21.90
- ADHK	14.23	14.74	15.26	15.81	16.55
- PertumbuhanPDRB per Kapita ADHK 2010/	3,3 0	3,6 6	3,5 4	3,6 2	4,6 4
<b>JumlahPenduduk (ribu orang)</b>	153,	156,	159,	163,	166,
<b>PertumbuhanJumlahPenduduk</b>	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

### 1.1.5 c. Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah kestabilan harga-harga. Harga yang merupakan hasil interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang dan jasa yang beredar di masyarakat, perlu dipantau perkembangannya sebagai salah satu indikator penentu kebijakan pemerintah di bidang pendapatan, fiskal maupun moneter. Untuk memperoleh gambaran mengenai kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu dilakukan dengan menghitung indeks harga konsumen. Berdasarkan IHK inilah kemudian didapat besaran angka inflasi/deflasi yaitu besarnya persentase perubahan IHK antar periode.

Nilai inflasi yang terlalu tinggi akan mendorong turunnya investasi, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah daya beli dari uang dan dengan sendirinya semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Laju inflasi yang tidak terlalu tinggi akan membuat stabilitas tetap terjaga dan roda perekonomian dapat terus bergulir.

Selama periode 2013-2017 laju inflasi tahun kalender Kota Bima mengalami perkembangan yang fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,06 persen diikuti tahun 2014 sebesar 7,16 persen. Pada tahun 2015 laju inflasi Kota Bima sudah rendah, yaitu 4,29 persen dan terus turun hingga mencapai titik terendahnya selama periode 2013-2017 yaitu di tahun 2016 pada angka 3,10 persen yang kemudian sedikit naik menjadi 4,04 persen pada tahun 2017.

**Tabel 2.17.**  
**Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013-2017 Kota Bima**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Bima	10,06	7,16	4,29	3,10	4,04

*Sumber : BPS Kota Bima, 2018*

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

##### a. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah UMKM, pada awal tahun 2013 tercatat sebanyak 1874 UMKM dan pada tahun 2017 telah tumbuh mencapai 7080 UMKM. Sedangkan Jumlah Koperasi Aktif, pada tahun 2013 tercatat sebanyak 64 koperasi dan pada tahun 2017 bertambah menjadi sebanyak 108 koperasi koperasi aktif.

Selain itu, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM juga telah didirikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan konsultan pelatihan bisnis, pendampingan bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan promosi, networking dan layanan perpustakaan usaha, yang dibantu oleh 7 orang konsultan pendamping untuk mendampingi KUMKM.

**Tabel 2.18.**  
**Pertumbuhan UMKM di Kota Bima Tahun 2013 – 2017**

No.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah UMKM	1874	3535	4944	6303	7080
2.	Jumlah Koperasi Aktif	64	72	85	93	108

*Sumber: Dinas Koperindag Kota Bima, 2018*

### 1.1.6 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 1. Perdagangan

Penyediaan pasar tradisional sebagai pusat distribusi perdangan, pada tahun 2013 tercatat sebanyak 6 pasar tradisional. Adapun realisasi penyediaan pasar tradisional setiap tahun hingga tahun 2017 yaitu masing-masing satu unit los pasar tradisional yang dibangun.

Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang ditangani, pada tahun 2013 sebanyak 272 dan pada tahun 2017 sebanyak 450 orang pedagang kaki lima dan pedagang asongan dapat ditangani.

#### 2. Industri

Jumlah industri Kecil Menengah (IKM), pada tahun 2013 sebanyak 121 IKM an pada tahun 2017 berkembang menjadi 151 IKM. Sedangkan jumlah sentra industri yang ditangani, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 73 sentra.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

### 2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Progam dan Kegiatan RKPD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dapat diuraikan sebagai berikut.

#### A. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

##### 1. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Perkembangan koperasi ditunjukkan dengan peningkatan data keragaan koperasi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif ditargetkan sebanyak 101 unit, realisasi sebanyak 105 unit atau 103,96% dibandingkan dengan tahun 2016 realisasinya sebanyak 93 unit dan terdapat peningkatan sebanyak 12 unit atau 11,42% dan apabila dibandingkan lagi dengan target jangka menengah yang memiliki target 101 unit maka realisasi untuk tahun 2017 melebihi dari target sebanyak 4 unit.

**Tabel 2.19. Persentase Koperasi Aktif di Kota Bima 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	78	80	85	93	105
2.	Jumlah Koperasi (unit)	144	150	185	193	205

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, 2016

Untuk jumlah UMKM tahun 2017 ditargetkan sebanyak 1.559 UMKM terealisasi sebanyak 1.332 UMKM atau 85,44% jika dibandingkan dengan tahun

2016 yang realisasinya sebanyak 575 UMKM, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 757 UMKM atau 131,65%. dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang memiliki target 1.609 UMKM maka realisasi untuk tahun 2017 dibawah target sebanyak 277 UMKM.

Urusan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Dinas Koperindag Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.241.659.657,- dan tersealisasi sebesar Rp.2.197.184.159,- atau 98,69%.

#### a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran

Pembangunan di bidang koperasi dan UKM tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 program yaitu 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM; 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Realisasi program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 2.20. Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.236.904.557	1.221.747.865	98,77
-	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	346.500.000	335.185.000	96,73
-	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	116.480.000	92.604.424	79,50
-	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.600.000	1.179.700	73,73
-	Penyediaan jasa administrasi keuangan	54.000.000	49.800.000	92,22
-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.380.000	26.378.000	99,99
-	Penyediaan alat tulis kantor	39.294.000'	39.294.000	
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	154.900.000	154.900.000	100,00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.160.000	51.248.000	96,40
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	4.995.000	99,11

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
-	Penyediaan Makan dan Minuman	38.305.000	38.457.200	100,40
-	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	393.846.357	381.066.541	96,76
-	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	46.693.200	46.640.000	99,89
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136.807.000	135.110.000	98,76
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	89.500.000	89.500.000	100,00
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	25.876.000	25.560.000	98,78
-	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.431.000	20.050.000	93,56
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.260.000	24.260.000	100,00
-	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	24.260.000	24.260.000	100,00
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	89.200.000	89.200.000	100,00
-	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	16.500.000	16.500.000	100,00
-	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	55.200.000	55.200.000	100,00
-	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	17.500.000	17.500.000	100,00
5	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	155.410.000	154.596.000	99,48
-	Operasional dan Pengembangan UPT PLUT	155.410.000	154.596.000	99,48
6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	103.313.300	84.170.000	81,47
-	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	17.078.600	10.918.000	63,93
-	Penyelenggaraan bimbingan teknis bagi UMKM	86.234.700	73.252.000	84,94
7	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	292.370.500	290.150.614	99,24

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
-	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	61.025.000	60.574.000	99,26
-	Penyelenggaraan promosi usaha mikro kecil menengah	191.220.000	189.548.614	99,13
-	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40.125.500	40.028.000	99,76
8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	156.440.200	151.609.680	96,91
-	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	101.275.200	101.135.680	99,86
-	Pendampingan bagi kelembagaan koperasi	55.165.000	50.474.000	91,50
9	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi dan UMKM	46.954.100	46.340.000	98,69
-	Pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM	46.954.100	46.340.000	98,69

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program kegiatan tersebut, antara lain :

1. **Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif.**
2. **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.** Didukung oleh 2 kegiatan, terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan penyelenggaraan Bimbingan teknis bagi UMKM. *Keluaran (output)* dari kegiatan tersebut adalah, bertambahnya pemahaman peserta diklat kewirausahaan (50 orang selama 1 hari). Dan bertambahnya pemahaman peserta Bimbingan Teknis bagi UMKM (90 orang selama 3 hari).  
*Adapun hasil (outcomes)* program tersebut dilaksanakan untuk mendukung penumbuhan UMKM baru dan pengelolaan UMKM yang inovatif dan mandiri .
3. **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.** Dengan Output kegiatan:
  - 1) Pembinaan UMKM pengelolaan jaringan pemasaran produk yang dihasilkan dan jaringan koordinasi kelembagaan antar UMKM.
  - 2) Terlaksananya penyelenggaraan promosi produk UMKM (2 Kali ) di Provinsi dan luar provinsi.
  - 3) Terlaksananya monitoring dan pembinaan UMKM dan Koperasi.

4. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.** Keluaran (Output) dari kegiatan tersebut adalah:

- 1) Pelaksanaan sosialisasi serta penanaman prinsip-prinsip perkoperasian sehingga koperasi bisa berkembang dan mandiri
- 2) Terselenggaranya Pendampingan, pembinaan dan monitoring koperasi dan UKM (laporan penilaian kesehatan dan pemeringkatan Koperasi) tahun 2017, updating data KUMKM, pembuatan katalog dan tersedianya dokumen profil koperasi dan UMKM.

Adapun hasil (*Outcomes*) nya meliputi:

Meningkatnya tatakelola kelembagaan *koperasi aktif*, target capaian kinerja sebesar 101 unit dan terealisasi sebanyak 105 unit atau 103,96%.

**b. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM**

**Tabel 2.21. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM**

No.	Indikator	Target	Realisasi Capaian 2017	%
1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	101	105	103,96
2	Jumlah Pelaku UMKM	1.559	1.332	85,44

Capaian indikator kinerja untuk jumlah pelaku UMKM hanya 85,44% atau 1.332 UMKM, Tidak tercapainya realisasi yang target ini disebabkan karena tidak terlaksanakannya berbagai diklat dan pelatihan bagi masyarakat calon wirausaha baru oleh aparatur yang membidangnya seperti diklat dan pelatihan perbengkelan, konveksi, pangan jajan, pangan kuliner, dll.

**a. Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

Permasalahan yang masih dihadapi sekaligus menjadi tantangan ke depan yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Profesionalisme dan kemampuan teknis aparat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terpadu terhadap ekonomi rakyat yang masih harus terus ditingkatkan. Karena secara umum kelembagaan KUKM di Kota Bima terus berkembang namun belum didukung dengan pola pemberdayaan untuk meningkatkan daya kompetitif KUKM guna meningkatkan minat para investor untuk menanamkan modalnya pada usaha KUKM.

2. Fungsi dan kewajiban dari lembaga koperasi belum berjalan dengan optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada anggota/masyarakat, begitu pula sebaliknya peran serta anggota/masyarakat dalam mengembangkan koperasi masih perlu ditingkatkan.

### **Solusi**

Untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pemecahan sebagai berikut :

1. Pemerintah bersama Lembaga penggerak pertumbuhan ekonomi di sektor KUMKM perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peranan KUMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian kerakyatan yang berpihak pada usaha keci dan Usaha menengah; membuka akses pemasaran produk KUMKM sehingga seluruh KUMKM yang mempunyai potensi namun tidak memiliki jaringan pasar yang luas dapat memperoleh akses dengan usaha dagang/ industry.
2. Solusi atas permasalahan koperasi tersebut adalah memberikan informasi yang jelas dan gencar kepada masyarakat mengenai Program KUMKM yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat dapat membantu pengembangan dan pertumbuhan ekonomi bagi koperasi serta usaha kecil dan Menengah. Dan mengoptimalkan pelatihan manajerial dan kewirausahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan bagi pengelola KUMKM dengan.

## **C, Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan**

### **1. Perdagangan**

#### **a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pembangunan sektor perdagangan di kota Bima melalui 2 program dan 6 kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.22. Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Kota Bima Tahun Anggaran 2017**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	297.264.000	255.352.500	85,90
	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	31.517.000	23.013.000	73,02



	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	119.020.000	106.129.500	89,17
	Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan barang-barang ilegal (CHT)	34.047.000	27.905.000	81,96
	Pengawasan peredaran Cukai Ilegal (CHT)	112.680.000	98.305.000	87,24
<b>2</b>	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	<b>3.601.952.000</b>	<b>3.558.767.713</b>	<b>98,80</b>
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	3.187.440.000	3.147.149.000	98,74
	peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	219.425.000	216.531.713	98,68
	Operasi pasar murah	195.087.000	195.087.000	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.899.216.000</b>	<b>3.814.120.213</b>	<b>97,82</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Realisasi anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perdagangan tahun 2017 adalah mencapai 94,82%. Beberapa program dan kegiatan utama yang mendukung pelaksanaan urusan perdagangan, yaitu:

### **1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**

Program ini menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Barang-barang Ilegal (DB-HCHT) dan Pengawasan peredaran Cukai Ilegal (DB-HCHT).

**Adapun keluaran (output)** dari kegiatan tersebut adalah:

- Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Barang-barang Ilegal, yang dilaksanakan di 5 kecamatan Kota Bima dan peserta sosialisasi pelaku usaha.
- Pelaksanaan pengawasan peredaran cukai ilegal yang dilakukan langsung pada pusat pertokoan, pasar, kios-kios, pedagang kaki lima di terminal, dan pergudangan besar serta distributor.

### **2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.**

1) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk, anggaran pada kegiatan ini menggunakan dana DAK dengan output utamanya:

- Terlaksananya pengendalian dan pengamanan peresmian pasar raya amahami

- Pelaksanaan kegiatan pasar ramadhan
  - Pelaksanaan kegiatan pasar lebaran
  - 1 paket pembangunan tempat prasati (papan nama pasar)
  - 1 paket tampias hujan/papan iklan
  - Revitalisasi pasar Kumbe
  - Instalasi jaringan listrik Kios pasar Kumbe
  - Timbunan pasar raya Amahami
- 2) Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, dengan output utamanya Pelaksanan monitoring harga sembako dan pengawasan pengendalian barang dan jasa (dan penyampaian informasi harga sembako pada masyarakat yang dilaksanakan di 5 kecamatan Kota Bima).
- 3) Kegiatan Operasi Pasar murah, dengan output utamanya Operasi pasar murah dilaksanakan 2 kali, pada bulan ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri.

#### **b. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja urusan perdagangan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.23. Capaian kinerja Urusan Pilihan Perdagangan Tahun Anggaran 2017**

Indikator	Target	Realisasi Capaian 2017	%
Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang	220 unit	224 unit	110,91

Tahun 2017 jumlah Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang ditargetkan sebanyak 220 unit, sedangkan realisasinya sebanyak 224 unit atau 110,91%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang realisasinya sebanyak 225 unit, terdapat penurunan sebanyak 1 unit dan apabila dibandingkan lagi dengan target jangka menengah yang memiliki target 245 unit maka realisasi untuk

tahun 2017 dibawah target jangka menengah. Tidak tercapainya realisasi dari target yang diinginkan ini disebabkan belum adanya aparatur teknis yang dimiliki. Dan untuk meningkatkan realisasi tersebut perlu dilakukan pelatihan/diklat teknis untuk aparatur Dinas Koperindag Kota Bima.

### c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Perlu diupayakan alokasi anggaran tambahan untuk memperluas daya tampung bangunan pasar tradisional serta penataan lingkungan pasar yang mendukung terwujudnya pasar tradisional yang sehat dan berwawasan lingkungan.
- 2) jumlah yang ditera dan ditera ulang mewakili aspek perlindungan terhadap konsumen. Dengan meningkatnya jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang, pemerintah Kota Bima lebih mengupayakan jaminan atas tertibnya alat ukur yang digunakan di pusat perdagangan sehingga intensitas pengawasannya perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM tekhnis dengan mengikuti pelatihan/diklat tekhnis PPNS.

## 2. Perindustrian

Sektor industri memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah produk-produk Kota Bima dan penyerapan tenaga kerja. Industri di Kota Bima didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM).

### a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan IKM di Kota Bima dilaksanakan dalam 4 program dengan total pagu sebesar Rp.2.353.376.143,- yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima. Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp.2.211.138.462,-atau 93,96%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.24. Program/ Kegiatan Urusan Industri Kota Bima Tahun Anggaran 2017**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi</b>	181.510.000	125.730.000	69,27
	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	181.510.000	125.730.000	69,27
2	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	203.631.000	189.284.300	92,95

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	70.995.000	60.235.000	84,84
	Lomba Rancang Busana	132.636.000	129.049.300	97,30
<b>3</b>	<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>	<b>175.439.400</b>	<b>153.948.519</b>	<b>87,75</b>
	Pembinaan Kemampuan teknologi industri	121.974.200	100.942.839	82,76
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	53.465.200	53.005.680	99,14
<b>4</b>	<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	<b>1.792.795.743</b>	<b>1.742.175.643</b>	<b>97,18</b>
	Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat	33.140.100	14.127.000	42,63
	Promosi produk kerajinan	47.195.643	44.667.643	94,64
	Penyediaan Sarana dan prasarana pengembangan sentra industri	1.712.460.000	1.683.381.000	98,30
	<b>TOTAL</b>	<b>2.353.376.143</b>	<b>2.211.138.462</b>	<b>93,96</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

### **1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**

Program ini diwujudkan melalui kegiatan penguatan kemampuan Industri berbasis teknologi dengan output utamanya:

Pelaksanaan diklat pengelasan, peningkatan kualitas produk pangan dan diversifikasi tenun (30 orang selama 10 hari), diklat manajemen sederhana (30 orang selama 3 hari) diharapkan mampu meningkatkan diversifikasi dan jaminan pengolahan, penerapan manajemen pada IKM.

### **2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.

Keluaran (Output) dari kegiatan tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan Lomba Rancang Busana diharapkan dapat lebih dikenalnya produk tenun Kota Bima dan menumbuh kembangkan kreatifitas pengrajin tenun dan olahan hasil tenun/diversifikasi tenun
- b. Monitoring rutin IKM dalam rangka pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah.

### 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

4) Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri, yang didukung dengan Output dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya pembinaan kemampuan teknologi industri pelaksanaan kegiatan temu usaha.

5) kegiatan Pengembangan dan Pelayanan teknologi industri.

Output dari kegiatan tersebut adalah dilaksanakannya pendampingan langsung pada IKM antara lain pendampingan diagnosis/shindansi dan pendampingan pada industri kemasan, pendampingan IKM.

### 4. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Program ini diwujudkan dengan kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat dan kegiatan promosi produk industri kerajinan.

Output dari kegiatan tersebut adalah:

- a. Dokumen profil IKM dan sentra IKM, Katalog IKM
- b. Terlaksananya penyelenggaraan promosi produk UMKM (2 kali pameran dalam kota dan dalam Provinsi).

#### b. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan Industri pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.25. Capaian kinerja Urusan Pilihan Perindustrian Tahun Anggaran 2017**

Indikator	Target	Realisasi Capaian 2017	%
Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	157	94	59,87
Jumlah Sentra Industri yang ditangani (sentra)	74	73	98,65

Sumber Data: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima 2017

- Indikator kinerja Tahun 2017 ini memiliki target sebanyak 157 IKM dan realisasinya sebesar 94 IKM atau 59,87%.
- Indikator kinerja Tahun 2017 ini memiliki target sentra industri yang ditangani sejumlah 74 sentra dan realisasinya sebesar 73 IKM atau 98,65%.

#### c. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Perkembangan Industri khususnya IKM cukup berkembang namun perkembangan industri non formal ke industri formal masih kecil diakibatkan karena terkendala pada penerbitan legalitas (Izin);
- 2) Pembinaan dan pengembangan Industri kecil dan menengah terkendala pada:
  - a. Kualitas Sumber Daya Manusia masih cukup rendah,
  - b. Kualitas Produk IKM masih tertinggal dari daerah lain;
  - c. Pemasaran produk masih terbatas;
  - d. Jumlah aparat pembina tidak berimbang dengan jumlah IKM yang cukup besar;
  - e. Ilmu, Skill dan sepsifikasi teknis aparat Masih kurang.

#### Solusi

- 1) Perlu ada kemudahan dalam perizinan khususnya IKM dengan memberikan perizinan gratis bagi IKM;
- 2) Kendala Pembinaan dan Pengembangan IKM dapat diatasi dengan :
  - a) Melaksanakan pembinaan berupa pemberian pelatihan/Diklat pengembangan ilmu dan keterampilan bagi pelaku usaha Industri;
  - b) Peningkatan kemampuan SDM harus dibarengi dengan Peningkatan wawasan usaha melalui kegiatan Magang serta peningkatan teknologi melalui bantuan peralatan/mesin;
  - c) Melaksanakan pameran produk IKM dalam Kota Bima serta mengikuti pameran produk IKM diluar daerah;
  - d) Mengajukan penambahan jumlah aparat Pembina IKM kepada pemerintah Kota Bima;
  - e) Mengirim/mengikut sertakan aparat dalam pelatihan/diklat pengembangan dan peningkatan kemampuan aparat.

### **2.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD**

Evaluasi capaian indikator kinerja sasaran dimulai dengan pengukuran realisasi capaian setiap indikator kinerja sasaran dibandingkan dengan target setiap tahunnya maupun terhadap target pada kondisi akhir RPJMD dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bima.

#### **1. Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan memperhatikan Produk Domestik Regional bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tertentu dalam waktu tertentu.

Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bima yaitu antara lain :

- a. Kondisi ekonomi dan stabilitas regional dan nasional sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seperti tingkat inflasi, kenaikan harga BBM, serta stabilitas politik .
- b. Pertumbuhan sektor pertanian, kelautan dan perikanan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti kemarau panjang dan gagal panen

Adapun sejumlah faktor keberhasilan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi adalah antara lain :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang berdampak pada membaiknya iklim investasi daerah.
- b. Tersedianya sumber daya alam yang baik sebagai modal dasar pembangunan daerah dimana ketersediaan lahan pertanian yang subur dan kekayaan laut memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan PDRB Kota Bima setiap tahunnya.
- c. Membaiknya kualitas infrastruktur perkotaan serta sarana dan prasarana pendukung sektor perdagangan dan jasa serta transportasi.

## **2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Bima dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi lokal, salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah PDRB Per Kapita.

Pendapatan per kapita pada suatu daerah dapat diindikasikan oleh nilai PDRB per kapita pada tahun tertentu. PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dari nilai tambah

yang tercipta selama satu tahun. PDRB per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang melebihi angka inflasi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat lebih baik, dan sebaliknya pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih rendah dari inflasi mencerminkan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Untuk mengetahui adanya pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat, dihitung dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDRB dapat terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pertumbuhan penduduk dan atau perubahan harga yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB-nya. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode 2012-2017 tumbuh pada kisaran angka 6-10 persen, sementara pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 dalam periode yang sama tumbuh sebesar 3-6 persen.



Tabel 2.26. Pertumbuhan PDRB dan Pendapatan Per Kapita Kota Bima Tahun 2014-2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
10	Meningkatnya Pertumbuhan	Pertumbuhan PDRB (%)	5,50	5,89	5,70	5,75	5,90	5,80	6,20	6,76	6,50	
11	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita Rp. (Juta)	17	17,08	18,50	18,74	20	20,25	22	23,18	25	

Tabel 2.27.

Capaian Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kota Bima Periode Tahun 2013-2018

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
15.	Urusan Koperasi												

	Usaha Kecil dan Menengah												
151.	Jumlah UMKM	1874 UMKM	1956 UMKM	3535 UMKM	2042 UMKM	4944UM KM	2135 UMKM	6303 UMKM	2226 UMK M	7080 UMKM	2323 UMKM		2323 UMKM
152.	Jumlah Koperasi Aktif	64	74	72	81	85	86	93	96	108	101		101
Fokus Layanan Urusan Pilihan													
6.	Perdagangan												
6.1	Penyediaan pasar tradisional sebagai pusat distribusi perdangan	6	8	7	10	9	11	10	12	11	13		11
6.2	Jumlah Pedagang Kaki Lima Dan Asongan yang ditangani	272 orang	246		370 orang		400 orang		440 orang		485 orang		485 orang
7.	Perindustrian												
7.1	Jumlah industri Kecil Menengah (IKM)	121 IKM	129 IKM	157	142 IKM	154	149 IKM	275 IKM	157 IKM	249 IKM	164	172	172
7.2	Jumlah sentara industri yang ditangani	73 sentra	73	73	73	95	74	73	74	73	74	113	113

### **2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada Tahun 2018 mengelola anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.2.261.513.761,31. realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.241.698.595,00 atau 96,94 % dari pagu anggaran. Sedangkan pagu anggaran belanja langsung Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima yang bersumber dari dana APBD Kota Bima Tahun 2018 berjumlah sebesar Rp.10.512.262.899,98 Sampai dengan 31 Desember 2018, realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 9.088.316.777,43 atau 86,45 %. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja langsung Tahun 2017 sebesar Rp.10.795.059.561,31 maka pada Tahun 2017 terjadi penurunan pagu anggaran sebesar Rp.282.796.661,33 atau sekitar 0,26 %. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada Tahun 2018 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kota Bima.

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima TA. 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan rutin Dinas yang membiayai 4 program dan 22 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp.1.678.708.908,00
2. Program dan kegiatan urusan Koperasi yang membiayai 4 program dan 9 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 574.154.362,00
3. Program dan kegiatan urusan Perindustrian yang membiayai 4 program dan 7 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.447.728.700,46
4. Program dan kegiatan urusan Perdagangan yang membiayai 2 program dan 7 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.146.026.211,97

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program TA. 2017 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

**Tabel 2.28**  
**Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2018**

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian Keu. (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.387.752.100,00	1.299.846.639,00	93,67	96,70
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	114.251.000,00	110.140.500,00	96,40	94,17
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.000.000,00	46.826.769,00	97,56	100,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	240.600.000,00	221.895.000,00	92,23	100,00
5	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	99.079.600,00	94.407.000,00	95,28	100,00
6	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	165.033.121,00	164.985.000,00	99,97	64,33
7	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	411.180.500,00	393.115.000,00	95,61	100,00
8	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	124.000.379,00	124.000.379,00	100,00	93,49
9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	116.834.300,00	87.282.222,00	74,71	63,60
10	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	252.569.700,00	193.441.091,00	76,59	88,04
11	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	92.072.400,00	87.326.200,00	94,85	58,60
12	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	2.786.609.000,00	2.752.911.211,97	98,79	100,00

13	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	223.821.800,00	199.024.049,00	88,92	98,04
14	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	2.138.196.100,00	1.071.417.121,46	50,11	88,53
<b>JUMLAH</b>		<b>8.200.000.000,00</b>	<b>6.846.618.182,43</b>	<b>83,49</b>	<b>93,61</b>

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2018 dan berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil capaian keuangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima sebesar 83,49 % dan capaian kinerja 93,61. Dengan capaian keuangan dan kinerja tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dapat kategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2018 ini terdapat 3 (tiga) program di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima yang tidak memenuhi target kinerja ( $\leq 100\%$ ) sebagaimana yang telah direncanakan yaitu : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM (63,60%), Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (58,60) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (64,33). Penyebab tidak terpenuhinya target kegiatan tersebut diatas disebabkan karena keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan akibat dari padatnya jadwal instruktur dan narasumber dan terlambatnya ketersediaan anggaran akibat dari lambatnya kegiatan ganti uang (GU) oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sehingga program dan kegiatan tersebut sebagian tidak dapat dilaksanakan.

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 14 program dan 22 kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada tahun 2018 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan (100%) sebagian besar telah memenuhi target kinerja yaitu sebanyak 11 program.

- c. Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.

- e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atau program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara pencapaian kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan dapat diperoleh dari hasil pencapaian target-target pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Permasalahan ini dapat diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode yang lalu, dan laporan evaluasi Renja dan RKPD.

Selain pencapaian target pembangunan, permasalahan dapat diperoleh melalui penelaahan kondisi lingkungan strategis baik regional, nasional maupun internasional yang mungkin akan mempengaruhi rencana pembangunan Kota Bima pada lima tahun yang akan datang.

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan menjadi sangat penting dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota Bima. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Bima.

Adapun permasalahan pembangunan pada masing-masing urusan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.29.

**Rumusan Permasalahan Pembangunan pada tiap Urusan**

Urusan	Permasalahan Pembangunan
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	Akses modal UMKM yang terbatas
	Banyak koperasi yang tidak aktif
	Banyak koperasi yang aktif tetapi tidak sehat
<b>Urusan Pilihan</b>	
Perdagangan	Pengelolaan Pasar belum optimal
	Pengembangan produk unggulan lokal belum optimal
Perindustrian	Pengembangan Industri Kecil belum memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan
	Pengembangan produk unggulan industri lokal belum optimal

### 2.3.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan utama pembangunan Kota Bima tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
2. Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah masih perlu ditingkatkan
3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
4. Belum optimalnya Infrastruktur dan Daya Dukung Lingkungan

Permasalahan pembangunan daerah tersebut selanjutnya diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kota Bima berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Bima

#### 2.3.1.1. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan

Permasalahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima berhubungan dengan masalah pokok antara lain; derajat kesehatan masyarakat yang



masih perlu ditingkatkan, rendahnya akses dan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka masih cukup tinggi, dan masih tingginya angka kemiskinan serta nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat belum terimplementasi dengan optimal, Peningkatan derajat kesehatan akan mempengaruhi usia harapan hidup karena akan mengurangi fluktuatifnya angka kesakitan dan juga angka kematian ibu - bayi – balita. Penyelesaian permasalahan pendidikan dan kesehatan akan menaikkan IPM yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2017, capaian IPM Kota Bima mencapai nilai 74,36 Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebesar 66,58 Jika dibandingkan dengan dengan nilai IPM kota/kabupaten di NTB, nilai IPM Kota Bima hanya kalah dari Kota Mataram yang sudah mencapai angka 77,84. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kota Bima masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM.

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudahan akses dan mutu pendidikan sangat diperlukan dalam rangka menaikkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah atau melanjutkan sekolah. Pembangunan sumberdaya manusia juga harus diimbangi dengan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Meskipun angka pengangguran mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017, namun Pemerintah Kota Bima harus mengatasi permasalahan yaitu perkembangan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Kualitas dan produktifitas tenaga kerja juga menjadi perhatian, mengingat di era global dituntut tenaga kerja yang berdaya saing untuk dapat eksis.

Permasalahan penurunan angka kemiskinan yang muncul adalah bahwa semakin kecil persentase kemiskinan, maka akan semakin sulit melakukan penurunan, karena sudah semakin detail mengarah kepada individu yang spesifik mengalami kondisi miskin. Hal ini menjadi sulit, karena jenis kemiskinan ataupun penyebab kemiskinan ikut bagian sebagai kendala. Selain itu, Kebijakan Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin juga sering menjadi permasalahan, khususnya terkait dengan kebijakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik dalam hal pemerataan kesempatan bekerja ataupun pemerataan kesempatan berusaha, yang pada akhirnya akan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita penduduk.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.30 berikut ini.

**Tabel 2.30.**  
**Rumusan Permasalahan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat**

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi	Ketrampilan angkatan kerja terbatas	Belum terbangun Balai Latihan Kerja yang bermutu Tingkat pendidikan angkatan kerja yang terbatas
	Kesempatan kerja terbatas	Lapangan kerja belum tersedia secara luas Dukungan untuk terciptanya wirausaha baru masih sangat terbatas
	Kualitas dan produktifitas angkatan kerja masih perlu ditingkatkan	Penyelenggaraan pelatihan kerja masih sangat minim

Sumber : Hasil Analisa Bappeda

### 2.3.1.2. Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah masih perlu ditingkatkan

Penyumbang PDRB terbesar di Kota Bima masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan menyumbang 23,71% dalam struktur PDRB Kota Bima tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima sebagian besar ditopang oleh sektor-sektor ekonomi, namun belum semua potensi ekonomi kreatif digali dan dikembangkan secara optimal sehingga sektor pariwisata belum dapat dioptimalkan .

Permasalahan belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; pertumbuhan industri rendah, rendahnya kunjungan wisata ke Kota Bima, masih rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM, belum optimalnya nilai ekspor perdagangan, belum optimalnya hasil produksi pertanian, maupun kelautan dan perikanan, serta masih minimnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas seni dari masyarakat.

Masalah industri tenun yang selama ini dikeluhkan oleh pengrajin adalah terkait dengan ketersediaan bahan baku. Harga maupun kualitas benang sebagai bahan baku menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh pengrajin. Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan adanya produksi batik cetak dengan

menggunakan motif khas Bima juga menjadi tantangan yang sangat serius dalam mengembangkan maupun memasarkan produk tenun tradisional. Persaingan dengan daerah lain yang juga memiliki produk tenun maupun batik sangat mempengaruhi pertumbuhan usaha kerajinan tenun di Kota Bima. Disisi lain, kelembagaan sentra dan penyediaan sarana dan fasilitas pendukung masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus ditingkatkan.

Masalah permodalan bagi UMKM juga menjadi salah satu hal yang belum dapat diatasi dengan optimal. Akses permodalan ke lembaga keuangan masih terkendala dengan jaminan kredit. Disisi lain belum kuatnya kelembagaan koperasi menjadi faktor penyebab belum optimalnya peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, termasuk didalamnya dalam penyediaan akses modal bagi UMKM.

Kualitas produk menjadi faktor yang harus mendapatkan perhatian di era pasar global. Produk yang tidak berdaya saing akan sulit sekali memasuki pasar regional maupun internasional. Dengan demikian, hanya produk dengan keunggulan kompetitif dan komparatif yang bisa bertahan di pasar global. Pasar global juga menuntut pelaku industri dalam penguasaan akses dan informasi pasar.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah dapat dilihat pada tabel 2.31 berikut ini.

**Tabel 2.31.**  
**Rumusan Permasalahan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah**

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertumbuhan Industri rendah	Melambatnya pertumbuhan industri tenun tradisional	Keterbatasan bahan baku
		Tingginya ongkos produksi
		Kurangnya pembinaan pada pengrajin
		Kurangnya media promosi dan pemasaran produk
	Masih rendahnya kualitas produk (luntur dan panas)	
	Penyediaan sarana dan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil masih sangat terbatas	Akses permodalan dan teknologi yang terbatas
	Potensi industri kreatif belum dikembangkan secara optimal	Pembinaan dan pendampingan untuk pengembangan industri kreatif belum optimal
	PMDN dan PMA masih rendah	Belum optimalnya iklim penanaman modal

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM	Jumlah koperasi aktif masih sangat kurang	Pembinaan terhadap koperasi masih minim
	Fasilitas akses permodalan ke lembaga keuangan bagi UMKM masih sangat terbatas	Kualitas kelembagaan koperasi belum optimal Produktifitas UMKM masih rendah
Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengembangan ekonomi kreatif	Masyarakat masih kurang melek teknologi	Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi
Belum optimalnya nilai ekspor perdagangan	Belum optimalnya produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor	Kapasitas produksi dan produktifitas masih rendah
		Kualitas produksi masih terbatas
		penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha masih terbatas

Sumber : Hasil Analisa Bappeda

### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang berhasil diidentifikasi pada setiap urusan pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode RPJMD tahun 2013-2018. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ini untuk memastikan bekerjanya perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Adapun permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 2.32. berikut ini.

**Tabel 2.32.**  
**Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR - FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>				
	<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>			
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha kecil, dan</b>			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR - FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	<b>Menengah</b>			
11.1	Persentase koperasi aktif	<	Banyak koperasi tidak aktif	Pembinaan kelembagaan koperasi
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	<	BPR/LKM aktif terbatas	Akses modal
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	<	BPR/LKM aktif terbatas	Akses modal
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	<	UMK produktif terbatas	Pelatihan, pendampingan dan bantuan modal
<b>Layanan Urusan Pilihan</b>				
<b>5</b>	<b>Perdagangan</b>			
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	<	Nilai ekspor belum terdata	Inventarisasi produk ekspor
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	<	Jumlah kelompok yang dibina terbatas	Ketersediaan anggaran
<b>6</b>	<b>Perindustrian</b>			
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	<	Jumlah kelompok yang dibina terbatas	Ketersediaan anggaran

#### 2.4. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis. Oleh karena itu dalam proses penyusunan isu strategis provinsi, perlu ada tahap selanjutnya yaitu proses pembobotan permasalahan menjadi isu strategis. Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

Ada lima kriteria pembobotan dalam penyusunan isu strategis pada dokumen RPJMD ini yaitu: (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah dan (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Sebelum dilakukan pembobotan isu strategis provinsi, sebelumnya dilakukan analisis isu strategis pada tingkat nasional dan regional. Berikut ini analisis isu strategis pada tingkat nasional, regional dan Provinsi NTB.

#### 2.4.1. Penelaahan terhadap RPJMN/RKP dan RKPD Propinsi NTB Untuk Kota Bima

Penelaahan terhadap RPJMN akan memuat prioritas pembangunan nasional yang relevan dengan prioritas pembangunana Kota Bima sebagai disajikan dalam table berikut ini.

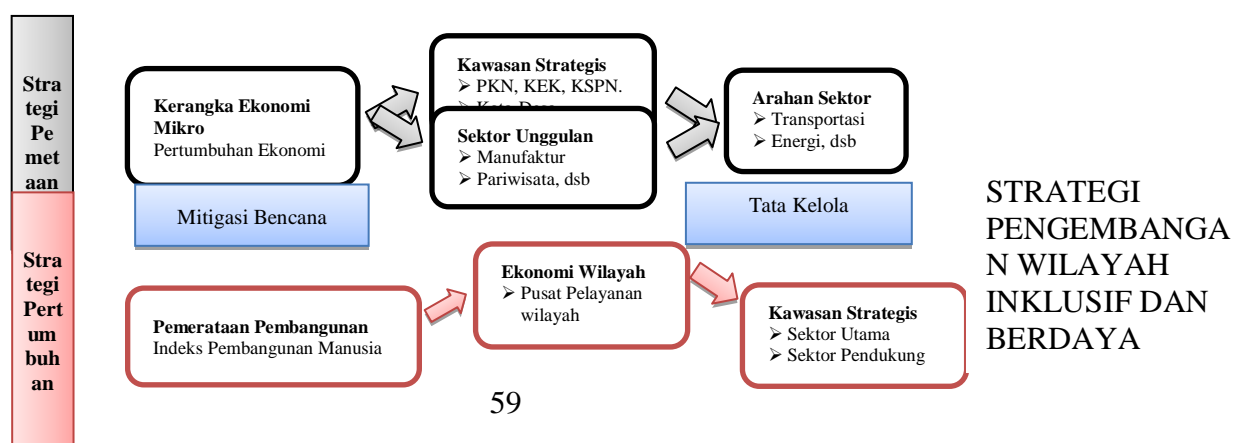
#### 2.4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

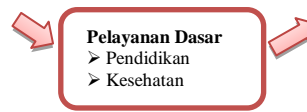
Adapun Tema RKP 2020 yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia untuk pertumbuhan berkualitas, dengan 5 (lima) Prioritas Nasional RKP 2020

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
2. Penguatan konektivitas dan pemerataan.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja.
4. Pemantapan ketahanan pangan air, energi dan pelestarian lingkungan hidup.
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Sedangkan strategi pembangunan dalam RKP Tahun 2020 meliputi:

#### 1. Strategi Pengembangan Wilayah





## 2. Strategi Pemerataan

- a. Pemenuhan standard pelayanan minimum untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan permukiman.
- b. Penguatan konektivitas intrawilayah antara pusat-pusat pertumbuhan di koridor utama dengan kawasan hinterland
- c. Pembangunan daerah tertinggi, kawasan perbatasan, transmigrasi, desa dan kawasan perdesaan.
- d. Penguatan peran kota-kota menengah dan kecil sebagai pusat kegiatan wilayah/lokal berbasis keunikan lokal dan inovasi

## 3. Strategi Pertumbuhan

1. Pengembangan kawasan-kawasan strategis pusat pertumbuhan dengan mengintegrasikan kawasan industry/pariwisata dan infrastruktur pendukung seperti transportasi, energy dan logistik.
2. Penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
3. Regionalisasi penyelenggaraan pelayanan perkotaan di wilayah-wilayah metropolitan dan kota-kota (satelit) sekitarnya.
4. Internalisasi resiko/kerawanan bencana dalam pembangunan kawasan padat dan infrastruktur wilayah.

### 2.4.3. Rencana Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara 2020-2024

Tema pembangunan wilayah nusa tenggara yaitu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan kawasan minapolitan. Sedangkan focus penanganan untuk Kota Bima adalah penyelesaian proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang tahun 2016 yang belum selesai.

### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Penyumbang PDRB terbesar di Kota Bima masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan menyumbang 23,71% dalam struktur PDRB Kota Bima tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima sebagian besar ditopang oleh sektor-sektor ekonomi, namun belum semua potensi ekonomi kreatif digali dan dikembangkan secara optimal sehingga sektor pariwisata belum dapat dioptimalkan .

Permasalahan belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; pertumbuhan industri rendah, rendahnya kunjungan wisata ke Kota Bima, masih rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM, belum optimalnya nilai ekspor perdagangan, belum optimalnya hasil produksi pertanian, maupun kelautan dan perikanan, serta masih minimnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas seni dari masyarakat.

Masalah industri tenun yang selama ini dikeluhkan oleh pengrajin adalah terkait dengan ketersediaan bahan baku. Harga maupun kualitas benang sebagai bahan baku menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh pengrajin. Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan adanya produksi batik cetak dengan menggunakan motif khas Bima juga menjadi tantangan yang sangat serius dalam mengembangkan maupun memasarkan produk tenun tradisional. Persaingan dengan daerah lain yang juga memiliki produk tenun maupun batik sangat mempengaruhi pertumbuhan usaha kerajinan tenun di Kota Bima. Disisi lain, kelembagaan sentra dan penyediaan sarana dan fasilitas pendukung masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus ditingkatkan.

Masalah permodalan bagi UMKM juga menjadi salah satu hal yang belum dapat diatasi dengan optimal. Akses permodalan ke lembaga keuangan masih terkendala dengan jaminan kredit. Disisi lain belum kuatnya kelembagaan koperasi menjadi faktor penyebab belum optimalnya peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, termasuk didalamnya dalam penyediaan akses modal bagi UMKM.

Kualitas produk menjadi faktor yang harus mendapatkan perhatian di era pasar global. Produk yang tidak berdaya saing akan sulit sekali memasuki pasar



regional maupun internasional. Dengan demikian, hanya produk dengan keunggulan kompetitif dan komparatif yang bisa bertahan di pasar global. Pasar global juga menuntut pelaku industri dalam penguasaan akses dan informasi pasar.

Arah kebijakan ekonomi daerah yang berkaitan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berkaitan dengan permasalahan yang harus dihadapi oleh dinas. Rincian permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1.**  
**Rumusan Permasalahan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah**

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertumbuhan Industri rendah	Melambatnya pertumbuhan industri tenun tradisional	Keterbatasan bahan baku
		Tingginya ongkos produksi
		Kurangnya pembinaan pada pengrajin
		Kurangnya media promosi dan pemasaran produk
	Masih rendahnya kualitas produk (luntur dan panas)	
	Penyediaan sarana dan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil masih sangat terbatas	Akses permodalan dan teknologi yang terbatas
Rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM	Potensi industri kreatif belum dikembangkan secara optimal	Pembinaan dan pendampingan untuk pengembangan industri kreatif belum optimal
	PMDN dan PMA masih rendah	Belum optimalnya iklim penanaman modal
	Jumlah koperasi aktif masih sangat kurang	Pembinaan terhadap koperasi masih minim
Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengembangan ekonomi kreatif	Fasilitas akses permodalan ke lembaga keuangan bagi UMKM masih sangat terbatas	Kualitas kelembagaan koperasi belum optimal
		Produktifitas UMKM masih rendah
Belum optimalnya nilai ekspor perdagangan	Masyarakat masih kurang melek teknologi	Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi
		Belum optimalnya produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor
Kualitas produksi masih terbatas		
penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha masih terbatas		

Sumber : Hasil Analisa Bappeda

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Keuangan Pemerintah Kota Bima dikelola berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat, dimana peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Asumsi dasar sebagai bahan penyusunan APBD dari tahun 2013 sampai dengan 2017 yaitu dengan memperkirakan faktor ekonomi makro antara lain; 1) pertumbuhan ekonomi; 2) tingkat inflasi; 3) stabilitas harga minyak; dan juga asumsi perkembangan PDRB maupun asumsi-asumsi lain yang berkaitan dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Adapun struktur APBD di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.2**  
**Struktur Keuangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**  
**Tahun Anggaran 2018**

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
<b>I</b>	<b>Pendapatan</b>			
1	Pendapatan Asli Daerah	1.645.786.000,00	922.787.985,00	56,07
<b>II</b>	<b>Belanja</b>			
<b>1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
	- . Belanja Pegawai	2.312.262.899,98	2.241.698.595,00	96,94
<b>2.</b>	<b>Belanja langsung</b>			
	- . Belanja Pegawai	880.591.000,00	800.303.000,00	90,88
	- . Belanja Barang dan Jasa	2.987.369.400,00	2.789.834.478,00	93,39
	- . Belanja Modal	4.132.039.600,00.	3.060.117.004,43	74,06

## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

#### **4.1.1. Visi Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023**

Adapun visi Kota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah ***Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri***, yang didukung oleh 5 misi sebagai upaya yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**.

#### **4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023**

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut:

**Tabel 4.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima**  
**Tahun 2018-2023**

<b>VI : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA</b>													
<b>SI menuju masyarakat Maju dan Mandiri</b>													
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Peningkatan Produk Unggulan;	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks Williams	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Per sen (%)	6,76	6,5	5,8	6,19	6,58	6,97	7,36	7,36
			Meningkatkan produktifitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa	PDRB sektor perdagangan	Rp. Juta	652.960,50	672.549,32	692.725,79	734.289,34	793.032,49	864.405,41	950.845,95	950.845,95
				PDRB sektor Jasa	Rp. Juta	489.360,20	504.041,01	519.162,24	550.311,97	594.336,93	647.827,25	712.609,98	712.609,98
				PDRB sektor industri kreatif	Rp. Juta	96.369,50	99.260,59	102.238,40	108.372,71	117.042,52	127.576,35	140.333,99	140.333,99

Sumber : Hasil Analisa dan Cascading Bappeda

#### 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Program pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023. Untuk itu di rumuskan Prioritas Pembangunan Kota Bima yang mencakup delapan (8) sektor, dimana Dinas Koperindag bertanggungjawab dalam pembangunan ekonomi. Keseluruhan Prioritas Pembangunan Kota Bima dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Agama
2. Pembangunan Pendidikan
3. Pembangunan Kesehatan
4. Pembangunan Ekonomi
4. Pembangunan Ketenagakerjaan
5. Penanggulangan Kemiskinan
6. Reformasi Birokrasi
7. Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang
8. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Selanjutnya program prioritas pembangunan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam program-program pembangunan menurut sasaran pada setiap misi pembangunan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2.**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2020**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD				Urusan	
					2019		2020			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18	
<b>Tujuan 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia</b>	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai								
<b>Sasaran 1.1.3. Meningkatkan Daya Beli masyarakat</b>	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000/bulan		3.140,24	3.454,26			3.799,69		
Program penciptaan iklim usaha	Meningkatnya jumlah	%		75	80	40.597,50	80	42.627,38		Koperasi dan UKM

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD				Urusan	
					2019		2020			
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18	
Usaha Kecil Menengah yang konduksif	KUMKM yang berbeda n hukum									
Program Pengembang an Kewirausaha an dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkat nya pertumbu han Wirausaha Baru	WUP		100	100	444.729 ,00	120	466.965 ,45	Koperas i dan UKM	
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningk atnya Pemenu han Barang dan Jasa	%		100	100	3.477.1 03,50	100	3.650.9 58,68	Perdaga ngan	
<b>Tujuan 2.1. Meningkatka n pemerataan ekonomi masyarakat</b>	Indeks Williamson	Nilai								
<b>Sasaran 2.1.1. Meningkatny a pertumbuhan ekonomi</b>	Pertumb uhan PDRB	Persen (%)	6,76	6,50	5,80		6,19			
Program pengembang an sentra- sentra industri potensial	Meningk atnya Sentra Industri di daerah	sentra		74	74	849.025 ,60	74	891.476 ,88	Perindu strian	
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningk atnya Pemenu han Barang dan Jasa	%		100	100	3.477.1 03,50	100	3.650.9 58,68	Perdaga ngan	
<b>Sasaran 2.1.3. Meningkatny a produktifitas sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa serta industri kreatif</b>	PDRB sektor perdaga ngan	Rp. Juta	652.96 0,50	672.54 9,32	692.72 5,79		550.31 1,97			

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD				Urusan
					2019		2020		
			2017	2018	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18
	PDRB sektor Jasa	Rp. Juta	489.360,20	504.041,01	519.162,24		108.372,71		
	PDRB sektor industri	Rp. Juta	96.369,50	99.260,59	102.238,40		75,00		
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen	%		85	95	1.378.830,50	95	1.447.772,03	Perdagangan
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya Pemenuhan Barang dan Jasa	%		100	100	3.477.103,50	100	3.650.958,68	Perdagangan
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Meningkatnya mutu dan nilai tambah produk industri kecil menengah	IKM			20	76.870,00	25	80.713,50	Perindustrian
Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM) di daerah	%		20	25	673.534,30	25	707.211,02	Perindustrian
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Meningkatnya Sentra Industri di daerah	sentra		74	74	849.025,60	74	891.476,88	Perindustrian

#### 4.3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sektor Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan sektor yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu Dinas Koperasi,



Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima terus meningkatkan peranannya dalam mengembangkan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Kebijaksanaan pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Kota Bima pada tahun 2020 diarahkan pada :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan kepada pelaku usaha
3. Meningkatkan bantuan modal kerja
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk
5. Meningkatkan legalitas / ijin usaha
6. Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)
7. Meningkatkan bantuan peralatan usaha
8. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
9. Meningkatkan produktifitas, efisiensi daya saing usaha Perindustrian dan Perdagangan
10. Meningkatkan pendapatan dan pengusaha perajin

Dalam tahun 2020 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima telah menetapkan sasaran yang ingin di capai sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag)
2. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pelaku usaha
3. Meningkatnya bantuan modal kerja
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk
5. Meningkatnya legalitas / ijin usaha
6. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Meningkatnya bantuan peralatan usaha
8. Meningkatnya sarana dan prasarana usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag)
9. Meningkatnya produktifitas, efisiensi dan daya saing usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag)
10. Meningkatnya pendapatan pengusaha dan pedagang

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Pemerintah Kota Bima Tahun 2018-2023. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Koperindag memerlukan perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk kerangka program, pendanaan serta target capaian kinerja. Penyusunan perencanaan tersebut harus memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang dan aspirasi masyarakat.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi pada Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Rencana pendanaan untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagian besar ditopang oleh APBD Pemerintah Kota Bima. Hal tersebut juga ditunjang oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebagian besar digunakan untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti pasar, gedung kantor serta sarana penunjang yang berupa peralatan untuk operasional seperti alat tera, alat produksi dan lain-lain.

Rencana Kerja Dinas Koperindag Kota Bima untuk Tahun 2020 terdapat 7 program utama dan 7 program pendukung. Dimana program utama dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
6. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

## 7. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Kegiatan adalah merupakan cara untuk mencapai tujuan yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Untuk mencapai tujuan / sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka dijabarkan kebijakan dan program sebagai pedoman / pegangan bagi para pelaksana kegiatan sebagai berikut

Sementara yang menjadi kelompok sasaran dari indikator kinerja OPD adalah masyarakat kota Bima dan internal OPD sendiri agar dapat menghasilkan optimalisasi pelayanan fungsi OPD bagi pembangunan kota Bima dalam mencapai visi & misinya.

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima tahun 2020 yang terdiri atas 13 Program dan terurai melalui 48 kegiatan, maka dana indikatif yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 23,736,366,700,- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima (APBD II) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Rincian program, kegiatan, target capaian kinerja beserta pendanaan dapat dilihat lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020

No	Kode Rek.				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							K	K	Rp	K		Rp	K
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	11	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Eksistensi Dinas terhadap Penyediaan barang /jasa dan administrasi perkantoran</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>100 %</b>	<b>1,480,639,006</b>	<b>APBD II</b>		<b>100 %</b>	<b>1,628,702,907</b>
				01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kota Bima	800 Surat	429,441,100	APBD II		800 Surat	472,385,210
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	Kota Bima	100 %	161,994,800	APBD II		100 %	178,194,280
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	Kota Bima	5 Unit	2,643,850	APBD II		5 Unit	2,908,235
				07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	Kota Bima	100 %	117,854,000	APBD II		100 %	129,639,400
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	Kota Bima	100 %	43,661,640	APBD II		100 %	48,027,804
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kota Bima	100 %	52,300,314	APBD II		100 %	57,530,345
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	Kota Bima	90 %	203,401,000	APBD II		90 %	223,741,100

				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Kota Bima	100 %	67,626,900	APBD II		100 %	74,389,590
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	Kota Bima	5 Media Bacaan	10,164,000	APBD II		5 Media Bacaan	11,180,400
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman selama 1 tahun	Kota Bima	100 %	46,096,402	APBD II		100 %	50,706,042
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Luar Daerah	65 Perjalan an	308,550,000	APBD II		65 Perjalan an	339,405,000
				19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kota Bima	40 Perjalan an	36,905,000	APBD II		40 Perjalan an	40,595,500
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya penyediaan &amp; pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>100 %</b>	<b>262,839,500</b>	<b>APBD II</b>		<b>100 %</b>	<b>289,123,450</b>
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan selama 1 tahun	Kota Bima	5 Unit	165,000,000	APBD II		5 Unit	181,500,000
				24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan selama 1 tahun,	Kota Bima	5 Unit	48,339,500	APBD II		5 Unit	53,173,450
				26	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan selama 1 tahun	Kota Bima	6 Jenis Perlengkap an	33,000,000	APBD II		6 Jenis Perle ngkap an	36,300,000
				28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan selama 1 tahun	Kota Bima	5 Jenis Pera latan	16,500,000	APBD II		5 Jenis Pera latan	18,150,000
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase pegawai yang mendapat hukuman disiplin</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>0 %</b>	<b>30,525,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>0 %</b>	<b>33,000,000</b>

				02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan	Kota Bima	40 Stel	30,000,000	APBD II		40 Stel	33,000,000
4	2	11	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan dengan indeks SAKIP</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>85 %</b>	<b>233,832,500</b>	<b>APBD II</b>		<b>85 %</b>	<b>257,215,750</b>
				02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Kota Bima	2 Dokumen	15,972,000	APBD II		2 Dokumen	17,569,200
				03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis	Kota Bima	4 Dokumen	17,908,000	APBD II		4 Dokumen	19,698,800
				04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	4 Dokumen	26,438,500	APBD II		4 Dokumen	29,082,350
				05	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPPA SKPD	Jumlah dokumen	Kota Bima	5 Dokumen	110,049,500	APBD II		5 Dokumen	121,054,450
				06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen	Kota Bima	3 Dokumen	63,464,500	APBD II		3 Dokumen	69,810,950
5	2	11	15		<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</b>	<b>Meningkatnya jumlah KUMKM yang berbadan hukum</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>200 KUMKM</b>	<b>214,486,316</b>	<b>APBD II</b>		<b>200 KUMKM</b>	<b>235,934,948</b>
				03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah KUMKM yang berbadan hukum	Kota Bima	200 KUMKM	82,500,000	APBD II		200 KUMKM	90,750,000
				12	Operasional dan pengembangan UPT PLUT	Meningkatnya pelayanan dan operasional PLUT selama 12 bulan	Kota Bima	100 %	131,986,316	APBD II		100 %	145,184,948

6	2	11	16		<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan Wirausaha Baru</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>30 %</b>	<b>276,358,038</b>	<b>APBD II</b>		<b>30 %</b>	<b>303,993,842</b>
				06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya pertumbuhan Wirausaha Baru	Kota Bima	175 WUB	116,788,958	APBD II		175 WUB	128,467,854
				07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Terlaksananya diklat koperasi	Kota Bima	30 Koperasi	88,000,000			30 Koperasi	96,800,000
				11	Penyenggaraan bimbingan teknis bagi UMKM	Jumlah UMKM yang dibina	Kota Bima	30 UMKM	71,569,080	APBD II		30 UMKM	78,725,988
7	2	11	17		<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan UMKM</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>30 %</b>	<b>372,501,547</b>	<b>APBD II</b>		<b>30 %</b>	<b>409,751,702</b>
				05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya pemantauan pengelolaan penggunaan dana bergulir	Kota Bima	85 %	82,500,000	APBD II		85 %	90,750,000
				07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Jumlah UMKM yang dibina	Kota Bima	30 UMKM	75,356,622	APBD II		30 UMKM	82,892,284
				09	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Meningkatnya promosi produk UMKM	Kota Bima	12 UMKM	184,764,580	APBD II		12 UMKM	203,241,038
				11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkanya pertumbuhan UMKM	Kota Bima	1,200 UMKM	29,880,345	APBD II		1,200 UMKM	32,868,380
8	2	11	18		<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>120 Koperasi</b>	<b>355,796,628</b>	<b>APBD II</b>		<b>120 Koperasi</b>	<b>391,376,291</b>
				04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Meningkatnya pengetahuan tentang perkoperasian lewat cerdas cermat	Kota Bima	85 %	180,868,743	APBD II		85 %	198,955,617

				05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi aktif	Kota Bima	120	Kop erasi	122,540,935	APBD II		120	Koper asi	134,795,029
				10	Pendampingan bagi kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi yang ditangani	Kota Bima	40	Kop erasi	52,386,950	APBD II		40	Koper asi	57,625,645
<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>15</b>		<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>4,262,709,755</b>	<b>APBD II</b>		<b>85</b>	<b>%</b>	<b>4,688,980,731</b>
				02	Kegiatan pendampingan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah Pengaduan Masyarakat	Kota Bima	75	Pen gaduan	38,135,570	APBD II		75	Pen gaduan	41,949,127
				03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah Pelaku Usaha	Kota Bima	200	Pela ku Usa ha	103,504,610	APBD II		220	Pelaku Usaha	113,855,071
						Terlaksananya Pembangunan Gedung Kemetrolgian	Kota Bima	200	Pela ku Usa ha	4,000,000,000	DAK		220	Pelaku Usaha	4,400,000,000
				06	Pengawasan peredaran Cukai Ilegal (CHT)	Jumlah pelaku usaha	Kota Bima	200	Pela ku Usa ha	121,069,575	APBD II		220	Pelaku Usaha	133,176,533
<b>10</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>18</b>		<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	<b>Meningkatnya Pemenuhan Barang dan Jasa</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>9</b>	<b>Bahan Pokok</b>	<b>13,324,734,840</b>	<b>APBD II &amp; DAK</b>		<b>9</b>	<b>Bahan Pokok</b>	<b>14,657,208,324</b>
				03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terlaksananya revitalisasi pasar sarae (lanjutan)	Kota Bima	1	Pasar	4,000,000,000	DAK		1	Pasar	4,400,000,000
						Terlaksananya revitalisasi pasar paruga (Lanjutan)	Kota Bima	1	Pasar	4,000,000,000	DAK		1	Pasar	4,400,000,000
						Terlaksananya revitalisasi pasar Kumbe	Kota Bima	1	Pasar	4,000,000,000	DAK		1	Pasar	4,400,000,000



						Terlaksananya pasar ramadhan	Kota Bima	200	UM KM	165,000,000	APBD II		200	UMK M	181,500,000
						Terlaksananya pasar lebaran	Kota Bima	200	UM KM	165,000,000	APBD II		200	UMK M	181,500,000
				06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Informasi harga barang dan jasa selama 12 bulan	Kota Bima	100	%	221,985,390	APBD II		100	%	244,183,929
				08	Operasi Pasar Murah	Tersubsidinya sembako untuk masyarakat	Kota Bima	6,000	KK	495,000,000	APBD II		6,000	KK	544,500,000
				09	Operasional dan Pengembangan UPT Pasar	Meningkatnya pelayanan dan operasional UPT Pasar selama 12 bulan	Kota Bima	100	%	277,749,450	APBD II		100	%	305,524,395
11	2	11	15		<b>Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>	<b>Meningkatnya nilai tambah produk industri kecil menengah (IKM)</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>50</b>	<b>IKM</b>	<b>200,433,475</b>	<b>APBD II</b>		<b>50</b>	<b>IKM</b>	<b>220,476,823</b>
				06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah ikm yang dibina	Kota Bima	50	IKM	200,433,475	APBD II		50	IKM	220,476,823
13	2	11	17		<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	<b>Meningkatnya industri kecil menengah (IKM) di daerah</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>166,410,574</b>	<b>APBD II</b>		<b>75</b>	<b>%</b>	<b>183,051,631</b>
				01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Meningkatnya industri kecil menengah (IKM) di daerah	Kota Bima	155	IKM	101,717,682	APBD II		155	IKM	111,889,450
				02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang ditangani	Kota Bima	5	IKM	64,692,892	APBD II		5	IKM	71,162,181
14	2	11	19		<b>Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial</b>	<b>Meningkatnya Sentra Industri di daerah</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>74</b>	<b>Sentra</b>	<b>2,555,099,521</b>	<b>APBD II &amp; DAK</b>		<b>74</b>	<b>Sentra</b>	<b>2,810,609,473</b>

				02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya data profile sentra industri	Kota Bima	74	Sentra	40,099,521	APBD II		74	Sentra	44,109,473
				04	Promosi kerajinan tangan	Meningkatnya partisipasi IKM dalam promosi produk	Kota Bima	12	IKM	185,000,000	APBD II		12	IKM	203,500,000
				05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sentra Industri	Terlaksananya pembangunan gedung produksi	Kota Bima	1	Unit	2,000,000,000	DAK		1	Unit	2,200,000,000
						Terlaksananya pengadaan bantuan peralatan dan mesin untuk industri kecil dan menengah (IKM)	Kota Bima	125	IKM	330,000,000	APBD II		125	IKM	363,000,000
					<b>JUMLAH</b>					<b>23,736,366,700</b>					<b>26,109,425,870</b>

**BAB VI****KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan proses keluaran hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran program atau kegiatan dari sasaran strategis Dinas Koperindag.

Dinas Koperindag memiliki 5 sasaran strategis yang dijadikan dasar dalam pencapaian kinerja utama yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, meningkatnya perlindungan terhadap konsumen, meningkatnya pertumbuhan UMKM, meningkatnya koperasi aktif serta meningkatnya iklim usaha daerah.

Adapun indikator kinerja dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama meliputi jumlah pasar yang terrevitalisasi, persentase pengaduan konsumen, persentase pertumbuhan UMKM, jumlah UMKM/usaha informal yang terbina, jumlah koperasi aktif dan jumlah kelompok pengrajin/IKM.

Pada perencanaan tahun 2020 ditargetkan pencapaian indikator kinerja utama masing masing 5 pasar, 75%, 15%, 6603 UMKM, 121 koperasi dan 1217 ikm. Untuk perkiraan maju tahun 2021 ditargetkan pencapaian indikator kinerja utama yaitu 6 pasar, 80%, 17,5%, 6753 UMKM, 133 koperasi, 1227 ikm.

**Tabel 6.1. Proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 dan 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2020	Perkiraan Maju Tahun 2021
				Target	Target
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa	1	Terlaksananya direvitalisasi/ pembangunan pasar	5 Pasar	6 Pasar
2	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	1	Persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan	75%	80%
3	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	1	Persentase pertumbuhan UMKM	15%	17,5%
		2	Jumlah pembinaan UMKM/ usaha informal	6603 UMKM	6753 UMKM
4	Meningkatnya koperasi aktif	1	Jumlah koperasi aktif	121 Koperasi	133 Koperasi
5	Meningkatnya iklim usaha daerah	1	Jumlah kelompok pengrajin/ IKM	1217 IKM	1227 IKM

## 6.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) memiliki 6 indikator yang terdapat pada masing-masing bidang. Bidang Perindustrian dan perdagangan memiliki indikator antara lain : kontribusi sektor industri terhadap PDRB, pertumbuhan industri, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB serta ekspor bersih perdagangan. Adapun bidang Koperasi dan UMKM memiliki indikator antara lain : koperasi aktif serta usaha mikro. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 6.2. Proyeksi Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Penanggung Jawab
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	3-5	Industri
2	Pertumbuhan Industri	Persen	30-40	Industri
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	20-30	Perdagangan
4	Ekspor bersih perdagangan	Persen	0	Perdagangan
5	Koperasi aktif	Persen	60-70	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6	Usaha mikro	Persen	30-40	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dalam mewujudkan visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima yakni “Berkembangnya Perekonomian Daerah Kota Bima Yang Berorientasi Pada Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Kelembagaan Usaha ”, maka kematangan rencana strategis 2018 – 2023 yang tertuang dalam rencana kerja tahunan adalah pedoman kerja untuk tahun 2020.

Sehingga langkah menuju Visi Kota Bima “Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera” dapat diwujudkan melalui partisipasi Dinas berdasarkan tupoksinya.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat dipedomani, ditindaklanjuti dan diwujudkan bersama.